



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tahun 2024



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

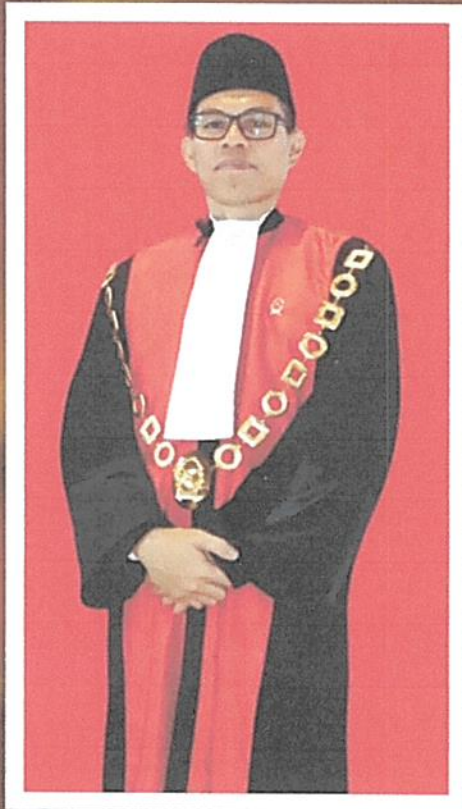
Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**



KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

KETUA



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H

WAKIL KETUA



HAKIM PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



Ismaya Salindri, S.H., M.H.



Silvia Kumalasari, S.H.



Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.



Ishmatul Lu`Lu, S.H.



Herjanriasto Bakti Nugroho,
S.H., M.H.



Niken Anggi Prajanti, S.H.,
M.Kn



PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



NORIPANSYAH, S.H.
Panitera



I MADE LANDEP, S.H.
Sekretaris



PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



Dede Andreas, S.H., M.H.
Panitera Muda Perdata



Laili Rahmah, A.Md., S.H., M.H.
**Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana**



Lelo Herawan, S.H.
Panitera Muda Hukum



Reinhard Simanjuntak, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan

KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun ketiga, maka Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Berpadu yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2024.

Pulang Pisau, 16 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKI UDDIN



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2024

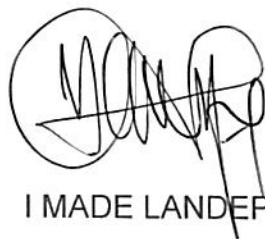
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulang Pisau, 16 Januari 2025

TIM REVIU



I MADE LANDEP, S.H.



NORIPANSYAH, S.H.

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No	Pernyataan	Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. ✓ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓ 4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. ✓ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. ✓ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. ✓ 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. ✓ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. ✓ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. ✓ 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja. ✓ 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.

		6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓
			✓

Pulang Pisau, 16 Januari 2025

TIM REVIU



I MADE LANDEP, S.H.



NORIPANSYAH, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan sasaran, Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,89 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	104,52 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,59 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			102,82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	103,09 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	103,09 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			103,09 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	105,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			105,26%
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	102,08%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			102,08 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024			102,65%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN... ..	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	11
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024.....	14
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	20
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN.....	74
BAB IV PENUTUP.....	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	vii
Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	15
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	21
Tabel 2.3. Revisi ke-I Rencana Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	26
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024.....	28
Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	31
Tabel 3.4. Perkara Pidana Yang Masuk Selama Tahun 2024.....	31
Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Perkara.....	32
Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Beban Perkara.....	32
Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Rasio Produktivitas.....	33
Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	34
Tabel 3.9 : Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu.....	38
Tabel 3.10. Perkara Perdata Yang Masuk Selama Tahun 2024.....	38
Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Perkara.....	39
Tabel 3.12. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Beban Perkara.....	39
Tabel 3.13 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Rasio Produktivitas.....	40
Tabel 3.14 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Perdata pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	41
Tabel 3.15 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	43
Tabel 3.16. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2024.....	44
Tabel 3.17. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	45
Tabel 3.18 : Perkara Upaya Hukum Banding.....	45
Tabel 3.19 Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024.....	47
Tabel 3.20. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	48
Tabel 3.21 Perkara Kasasi Selama Tahun 2024.....	49

Tabel 3.22 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2024	50
Tabel 3.23 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	51
Tabel 3.24 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2024	51
Tabel 3.25 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	53
Tabel 3.26 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2024	54
Tabel 3.27. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2024	55
Tabel 3.28. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2024	55
Tabel 3.29. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2024	55
Tabel 3.30. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2024.....	56
Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	57
Tabel 3.32 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	58
Tabel 3.33 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Pidana Tahun 2023	58
Tabel 3.34 : Persentase Salinan Putusan Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	60
Tabel 3.35 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Perdata Tahun 2024	60
Tabel 3.36 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	62
Tabel 3.37 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024	62
Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	63
Tabel 3.39 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 – 2024	64
Tabel 3.40 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 – 2024	64
Tabel 3.41 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	65
Tabel 3.42 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2024	66
Tabel 3.43 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	67
Tabel 3.44 : Data Layanan Posbakum Tahun 2019- 2024.....	67
Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024.....	69
Tabel 3.46 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	69

Tabel 3.47 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti.....	69
Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024.....	71
Tabel 3.49 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024.....	72
Tabel 3.50 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024	74
Tabel 3.51 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)	75
Tabel 3.52 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026).....	75
Tabel 3.53 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2024	77
Tabel 3.54 PNBPDIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2024	78
Tabel 3.55 : PNBPDIPA BUA Tahun 2019 - 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	79
Tabel 3.56 : PNBPDIPA BADILUM Tahun 2019 - 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau	80
Tabel 3.57. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	3
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	6
Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis	11
Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	11
Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	12
Gambar 3.1. Perkara Masuk Pidana Selama tahun 2024	29
Gambar 3.2. Beban Penanganan Perkara Pidana Tahun 2018-2024	30
Gambar 3.3 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Pidana Tahun 2018 – 2024 Perkara Pidana	31
Gambar 3.4. Perkara Masuk Perdata Selama tahun 2024	33
Gambar 3.5. Beban Penanganan Perkara Perdata Tahun 2018-2024	35
Gambar 3.6 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Perdata Tahun 2018 – 2024 Perkara Pidana	36
Gambar 3.7: Permohonan Banding Selama tahun 2024	37
Gambar 3.8. Permohonan Kasasi Selama tahun 2024	38
Gambar 3.9 : Nilai SMART DIPA BUA	59
Gambar 3.10 : Nilai SMART DIPA BADILUM	60
Gambar 3.11. Grafik Realisasi PNBPN Tahun 2019 – 2024	66
Gambar 3.12. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BUA Tahun 2019 – 2024	67
Gambar 3.13. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2024	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam melaksanakan agenda masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

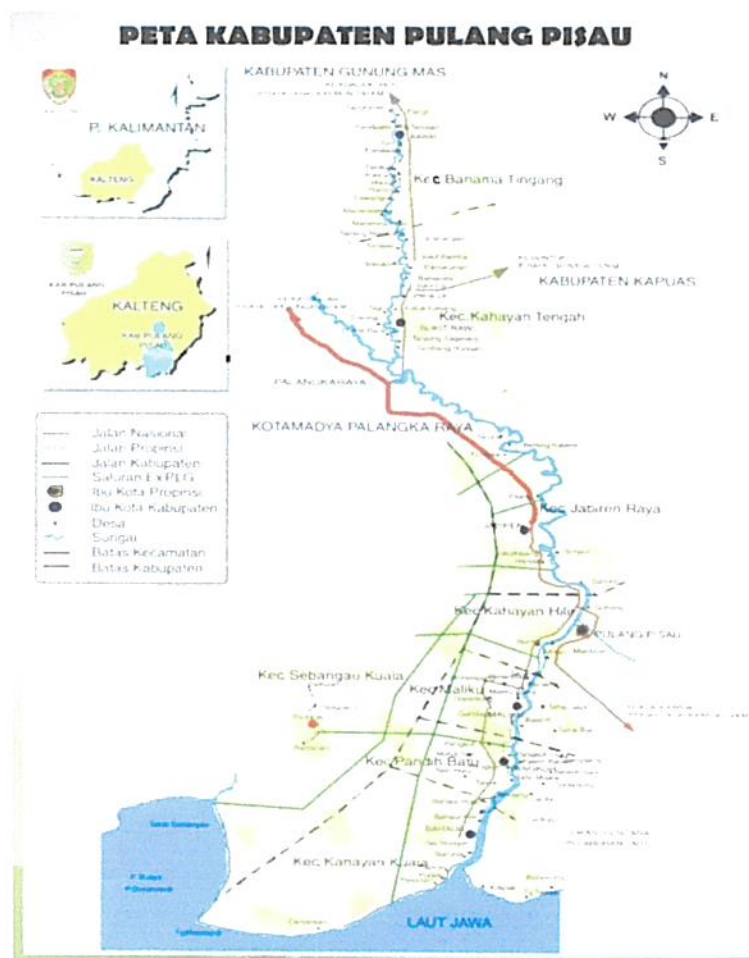
LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2018. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.



Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

2. Wewenang, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

a. Wewenang

- 1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

b. Fungsi

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Fungsi pembinaan

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan

Fungsi nasehat

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif

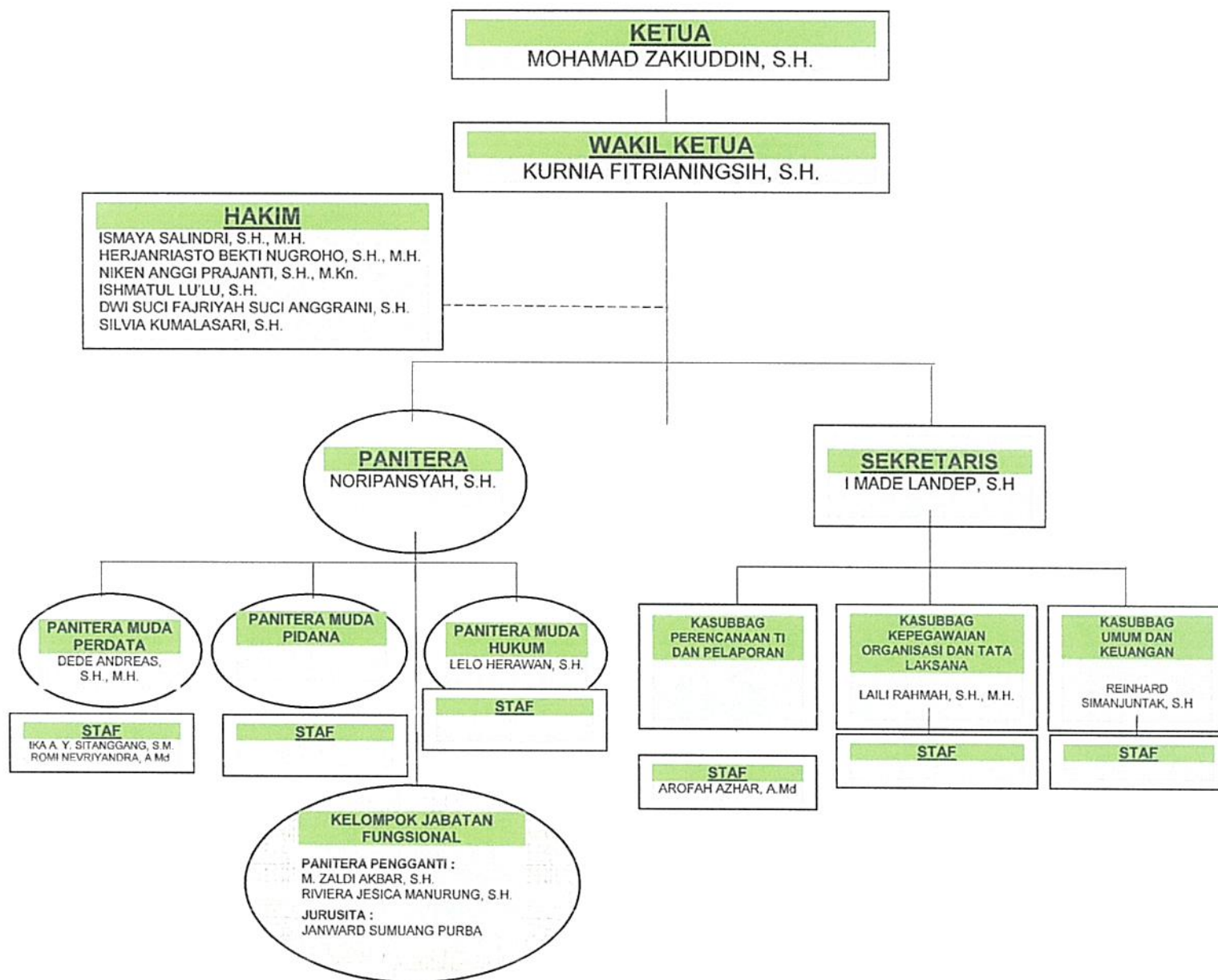
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan /Umum/perlengkapan).

Fungsi Lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau bertumpu pada isu-isu strategis, analisis faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

Potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dipetakan melalui analisis SWOT, sebagai metode perencanaan strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *strengths*, *weakness*, *opportunities* dan *threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis.

a) Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisis kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1) *Strengths* (Kekuatan)

- Potensi sumberdaya manusia secara kualitas cukup memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.
- Stuktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi).

2) *Weakness* (Kelemahan)

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan

Teknologi Informasi (TI), serta masih perlu pembenahan sarana dan prasarana TI di sektor internal Pengadilan.

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan public.
- Sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi beban kerja yang ada.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
- Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Peradilan melalui diklat maupun bimtek yang dilakukan secara berkesinambungan.

b) Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan luar yang dapat berpengaruh pada kinerja Instansi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, antara lain :

1) *Opportunities* (Peluang)

- Kepercayaan publik meningkat yang dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat, maupun stakeholders terkait lainnya.
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

2) *Threats* (Ancaman)

- Masih ada upaya dari pencari keadilan untuk melakukan intervensi terhadap Hakim pemeriksa perkara.
- Perkembangan TI yang sangat pesat namun tidak didukung dengan kapasitas maupun kualitas SDM yang memadai.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dalam rangka terwujudnya good governance. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi, wewenang, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Penjelasan tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

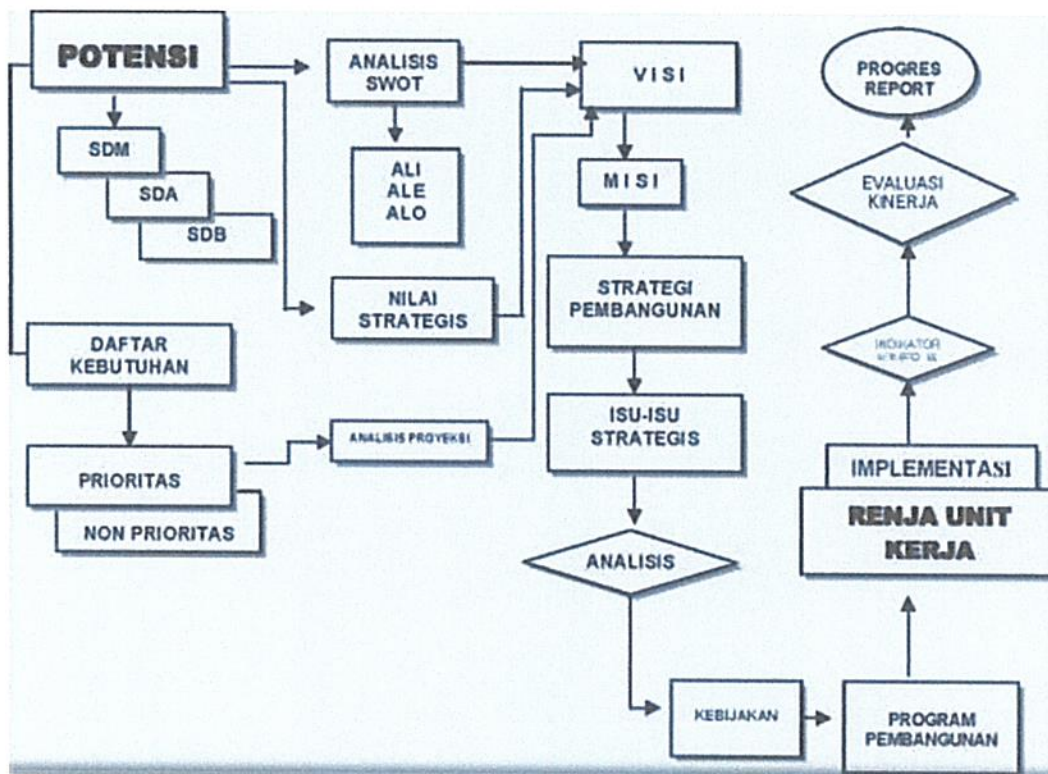
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 – 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pelaksanaan Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.



Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis

Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam
- SDM : Sumberdaya Manusia
- SDB : Sumberdaya Buatan
- ALI : Analisis Lingkungan Internal
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pulang Pisau merumuskan visinya, sebagai berikut

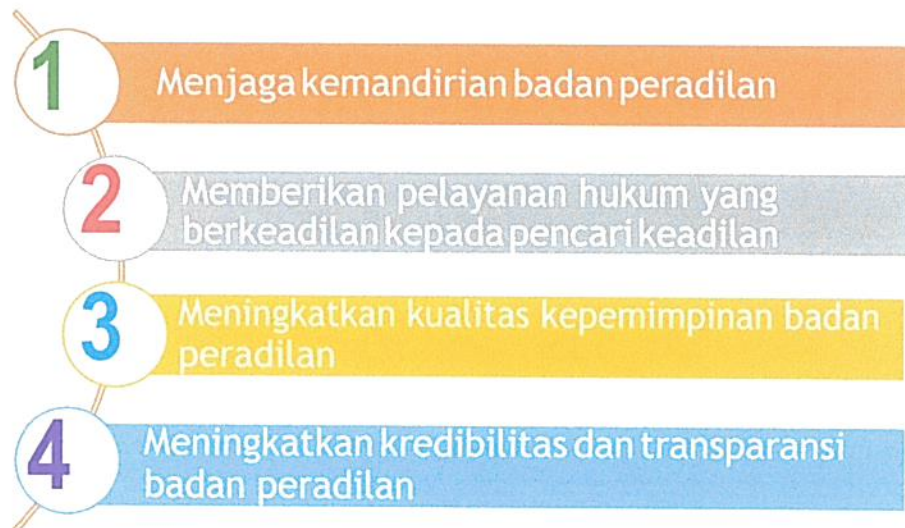


***Terwujudnya Pengadilan Negeri
Pulang Pisau Yang Agung***

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada stakeholders Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:



Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau **menetapkan sasaran strategis** sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut di tegaskan kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor W16-U11/3.c/KPN/OT.01/SK/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan reviu ke-I Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020 – 2024. Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	$\left(\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \right) \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\left(\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \right) \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial • Jumlah perkara yang di sel e salakan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. $\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilán.	Indeks kepuasan pencari keadilan Catatan : • PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasí dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasí yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasí dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasí dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasí pada tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Catatan : - Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaza</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan amaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan		
--	--	--	--	--	--

IKU TAMBAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$ Catatan : • Realisasi Anggaran adalah Rerata Jumlah Realisasi Anggaran dari 2 DIPA, yaitu DIPA BUA dan DIPA BADILUM	Sekretaris	Laporan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan di dalam 1 kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Persentase realisasi anggaran

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Program ini mencakup 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 memuat target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2024)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0,1 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %

Setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, Serta menindaklanjuti hasil LHE dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka dilakukan Reviu terhadap Rencana Strategis, Reviu IKU, Revisi Perjanjian Kinerja dan Revisi Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024. Adapun Revisi ke-1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 : Revisi ke-1 Rencana Kinerja Tahun 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2024)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	15 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %

5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98 %
---	---	-------------------------------	------

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dimana terdapat 5 (Lima) sasaran strategis dan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	15 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak	90 %

			Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		f.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau		Persentase realisasi anggaran	98 %

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran dengan total pagu Rp. 4.217.408.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	4.085.467.000,-
2	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	193.591.000,-
3	PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PERDATA YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK	26.000.000,-
JUMLAH		4.305.058.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	15 %	15,38 %	102,56 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80,00 %	83,58 %	104,47 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	91,40 %	101,56 %

		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75 %	3,885 %	103,60 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					102,71 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %	0 %	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					103,09 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					100,00 %

4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %	100 %	105,26 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					105,26%
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98,00 %	99,57 %	101,60 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					101,60%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024					102,54 %

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %

	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	15 %	15,38 %	102,56 %
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80,00 %	83,58 %	104,47 %
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	91,79 %	101,99 %
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75 %	3,885 %	103,60 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				102,78 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024:

Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Pidana tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 91 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu/ tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024

Tahun	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang diputus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	91	91	98 %	100 %	102,04%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2024	91	91	98 %	100 %	102 %
	2023	89	89		100 %	102 %
	2022	86	86		100 %	103 %
	2021	103	103		100 %	104 %
	2020	98	98		100 %	88 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Uika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102,04	103,09	104,17	88,19	100

Perkara Pidana yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2024 berjumlah 342 Perkara Pidana termasuk Perkara Lalu Lintas. Adapun Rincian Perkara Pidana yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2024

No.	Nama	Perkara Masuk
1	Pidana Biasa	88
2	Pidana Khusus Anak	2
3	Pidana Singkat	0
4	Pidana Cepat	2
5	Pidana Lalu Lintas	250
6	Pidana Praperadilan	0

Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2024 342

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara Pidana masuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Perkara Masuk Pidana Selama tahun 2024

Pada Tahun 2024 beban perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 103 perkara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 100 perkara. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 91 perkara pidana.

Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
Pidana	11	92	103	91	12	88,34 %
Jumlah	11	92	103	91	12	88,34 %

* Perkara yang Putus Tidak disertai dengan Perkara Pidana Lalu Lintas

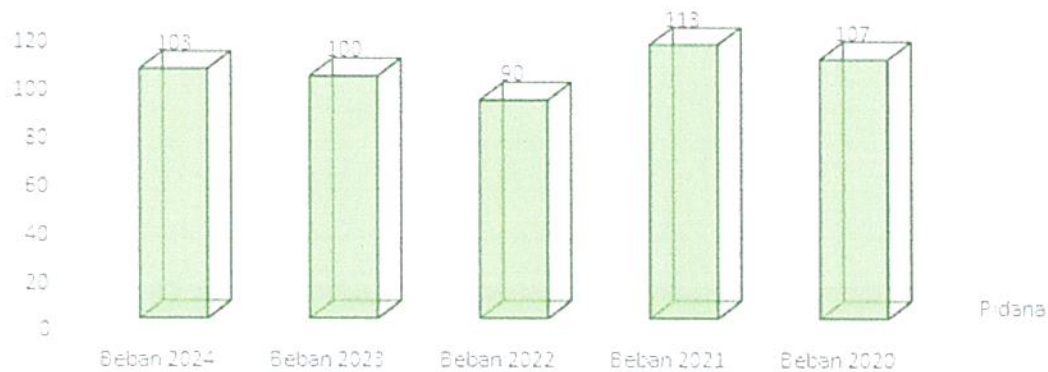
Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara Pidana adalah 88, 34% pada tahun 2024 atau turun 0,66% dari 89,00 % pada tahun 2023.

Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara	Beban 2024	Beban 2023	Beban 2022	Beban 2021	Beban 2020
Pidana	103	100	90	113	107
Jumlah	103	100	90	113	107

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya mengalami kenaikan dimana beban Perkara tahun 2024 berjumlah 103 perkara, sedangkan tahun sebelumnya 100 Perkara pidana tahun 2023 cenderung lebih rendah namun agak tinggi di tahun tahun sebelumnya yaitu 90 Perkara tahun 2022, 113 Perkara tahun 2021, 107 Perkara tahun 2020 dan 146 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Beban Perkara Pidana

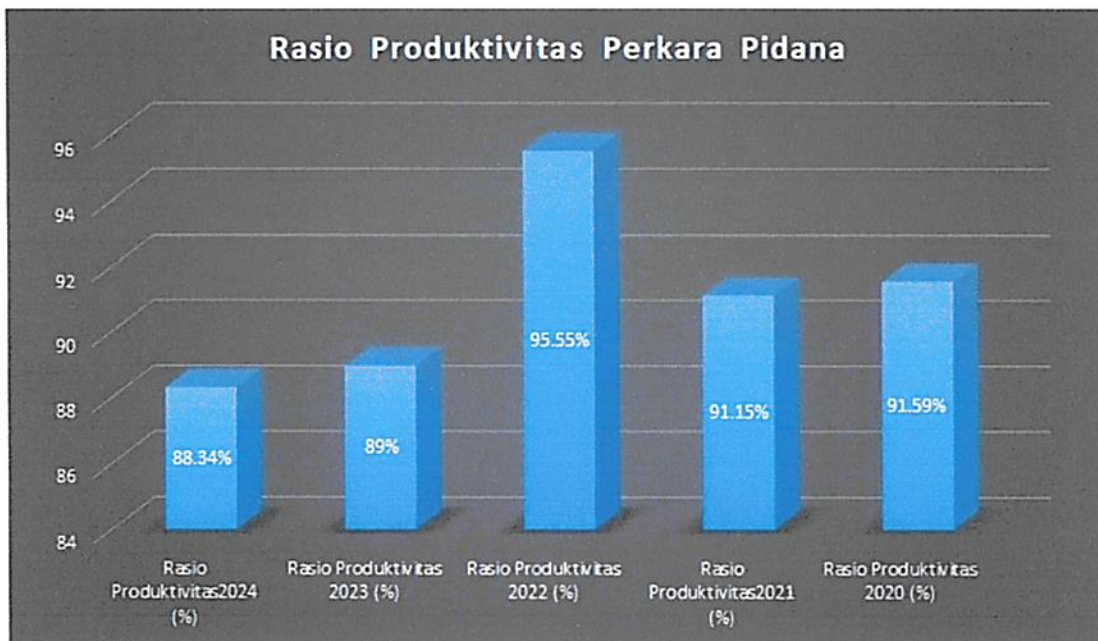


Gambar 3.2 Beban Penanganan Perkara Tahun 2020 – 2024 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara	Rasio Produktivitas 2024 (%)	Rasio Produktivitas 2023 (%)	Rasio Produktivitas 2022 (%)	Rasio Produktivitas 2021 (%)	Rasio Produktivitas 2020 (%)
Pidana	88,34	89,00	95,55	91,15	91,59
Jumlah	88,34	89,00	95,55	91,15	91,59

Sedangkan jika dilihat dari Rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 0,66%, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Rasio Produktivitas adalah 88,34% sedangkan tahun sebelumnya 89,00%, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2023 dan 2024.



Gambar 3.3 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2020 – 2024 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 5	5 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Pidana	90	1	0	0	0	91
	Jumlah	90	1	0	0	0	91
	%	98,90 %	1,10 %	0	0	0	100 %

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor:

- Keseriusan dan komitmen Pimpinan dan seluruh komponen yang terlibat

dalam pencapaian kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengawasan penanganan perkara dan penginputan SIPP yang diawasi oleh Hakim Pengawas Bidang Perdata, serta Satgas SIPP yang selalu mengingatkan penginputan SIPP dengan menggunakan aplikasi MIS dan EIS sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian target menjadi terpacu bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

- Adanya kemajuan IT khususnya pemanfaatan e-Court serta e-Litigasi dan persidangan secara elektronik mempermudah proses persidangan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien
- Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya
 - Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan untuk mendukung budaya kerja
 - Pimpinan memberikan reward dan punishment
 - Mengatur skema pelaksanaan jadwal persidangan yang tepat baik di dalam kota maupun di luar kota
 - Memaksimalkan penerapan e-Court dan e-Litigasi

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, jumlah Panitera, Panmud dan Panitera Pengganti sebanyak 5 orang

Sumber daya sarana dan prasarana persidangan secara elektronik mempermudah dan mempercepat proses persidangan secara elektronik secara e-Court dan e-Litigasi

Dengan penanganan perkara di 1 Kabupaten yakni Kabupaten Pulang Pisau terlihat bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat proporsional sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan professional serta didukung sarana dan prasarana IT yang mumpuni membuat pencapaian target menjadi lebih mudah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program-program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya

- Mengatur jadwal persidangan yang tepat baik persidangan
- Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan yang mendorong peningkatan budaya kinerja organisasi yang lebih baik
- Memberlakukan reward dan punishment agar setiap personil terpacu dalam penyelesaian perkara
- Melakukan pengawasan berjenjang, hingga hasil pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung persidangan
- Mengoptimalkan penggunaan DIPA 03 untuk mendukung penyelesaian perkara perdata
- Mengoptimalkan pengawasan SIPP melalui Satgas SIPP
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
- Melakukan sosialisasi pemanfaatan e-court dan e-Litigasi melalui medsos Pengadilan

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkan Perkara.

Sehingga dari 91 Perkara Pidana yang Putus tahun 2024, semua Perkara diselesaikan 100% tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang ingin dicapai adalah 98 %, sehingga Realisasi **Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Pidana tepat waktu** adalah **102,04%**.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor:

- Keseriusan dan komitmen Pimpinan dan seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengawasan penanganan perkara dan penginputan SIPP yang diawasi oleh Hakim Pengawas Bidang Perdata, serta Satgas SIPP yang selalu mengingatkan penginputan SIPP dengan menggunakan aplikasi MIS dan EIS sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian target menjadi terpacu bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
- Adanya kemajuan IT khususnya pemanfaatan e-Court serta e-Litigasi dan persidangan secara elektronik mempermudah proses persidangan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya

- Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan untuk mendukung budaya kerja
- Pimpinan memberikan *reward* dan *punishment*
- Mengatur skema pelaksanaan jadwal persidangan yang tepat baik di dalam kota maupun di luar kota
- Memaksimalkan penerapan e-Court dan e-Litigasi

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDIKATOR PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, jumlah Panitera, Panmud dan Panitera Pengganti sebanyak 5 orang
- Sumber daya sarana dan prasarana persidangan secara elektronik mempermudah dan mempercepat proses persidangan secara elektronik secara e-Cort dan e-Litigasi

Dengan penanganan perkara di 1 Kabupaten yakni Kabupaten Pulang Pisau terlihat bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat proporsional sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan professional serta didukung sarana dan prasarana IT yang mumpuni membuat pencapaian target menjadi lebih mudah.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA INDIKATOR PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya
 1. Mengatur jadwal persidangan yang tepat baik persidangan
 2. Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan yang mendorong peningkatan budaya kinerja organisasi yang lebih baik
 3. Memberlakukan *reward* dan *punishment* agar setiap personil terpacu dalam penyelesaian perkara
 4. Melakukan pengawasan berjenjang, hingga hasil pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti
 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung persidangan
 6. Mengoptimalkan penggunaan DIPA 03 untuk mendukung penyelesaian perkara perdata
 7. Mengoptimalkan pengawasan SIPP melalui Satgas SIPP
 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
 9. Melakukan sosialisasi pemanfaatan e-court dan e-Litigasi melalui medsos Pengadilan

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 2. Persentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

Tabel 3.9 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	90,24	102,04	103,09	104,17	88,19

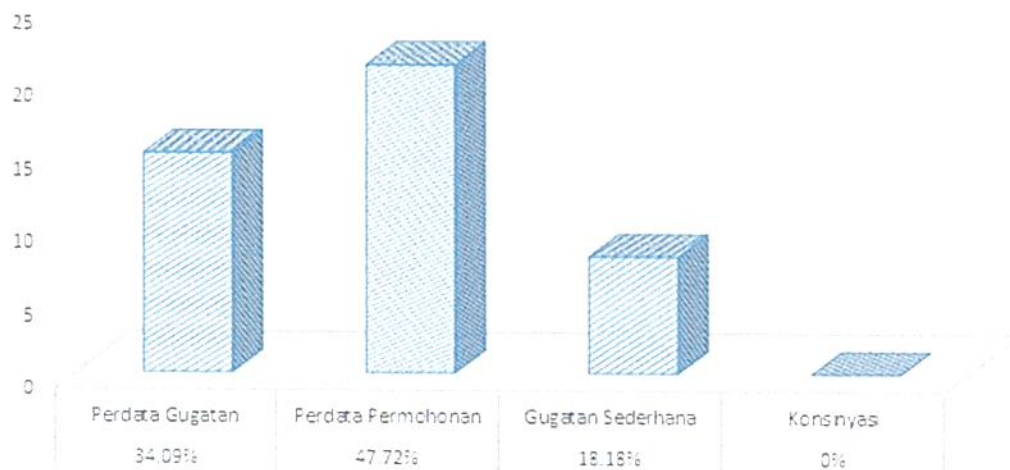
Perkara Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2024 berjumlah 44 Perkara, terdiri dari 15 Perkara Gugatan, 21 Perkara Permohonan, dan 8 Perkara Gugatan Sederhana. Adapun Rincian Perkara yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perkara Perdata Yang Masuk Selama Tahun 2024

No.	Nama	Perkara Masuk
1	Perdata Gugatan	15
2	Perdata Permohonan	21
3	Gugatan Sederhana	8
4	Konsinyasi	-
Jumlah Perkara yang Masuk Selama tahun 2024		44

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara perdata masuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERKARA PERDATA MASUK TAHUN 2024



Gambar 3.4. Perkara Perdata Yang Masuk Selama tahun 2024

Pada Tahun 2024 beban perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 46 perkara meningkat 53,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 30 perkara. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 43 perkara, sedangkan sisa perkara Tahun 2023 sebanyak 2 perkara berkurang.

Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
Perdata	2	44	46	43	3	93,47 %
Jumlah	2	44	46	43	3	93,47 %

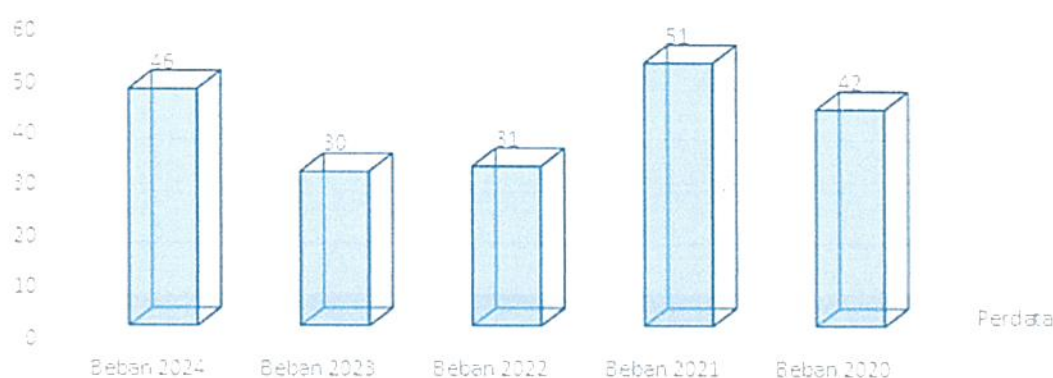
Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara adalah 93,47% pada tahun 2024 atau turun 3,2 % dari 96,67% pada tahun 2023.

Tabel 3.12. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara	Beban 2024	Beban 2023	Beban 2022	Beban 2021	Beban 2020
Perdata	46	30	31	51	42
Jumlah	46	30	31	51	42

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya meningkat dimana beban Perkara tahun 2024 berjumlah 46 perkara, sedangkan tahun sebelumnya 30 Perkara tahun 2023 cenderung lebih naik namun agak tinggi di tahun tahun sebelumnya yaitu 31 Perkara tahun 2022, 51 Perkara tahun 2021 dan 42 perkara tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi kenaikan Perkara Masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Beban Perkara Perdata



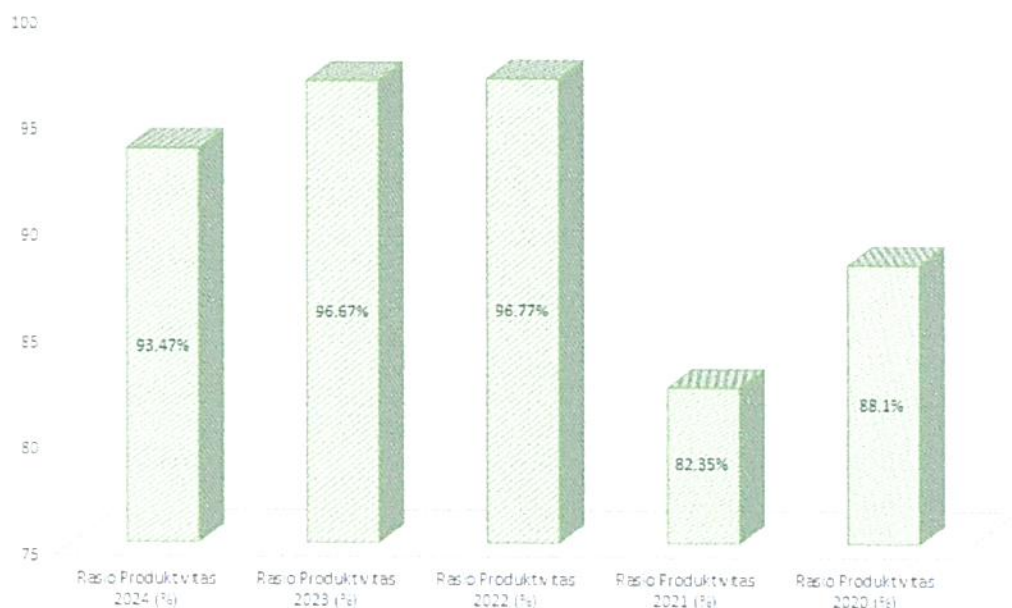
Gambar 3.5 : Beban Penanganan Perkara Tahun 2020 – 2024 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.13 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara	Rasio Produktivitas 2024 (%)	Rasio Produktivitas 2023 (%)	Rasio Produktivitas 2022 (%)	Rasio Produktivitas 2021 (%)	Rasio Produktivitas 2020 (%)
Perdata	93,47	96,67	96,77	82,35	88,10
Jumlah	93,47	96,67	96,77	82,35	88,10

Sedangkan jika dilihat dari rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 3,2 %, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Rasio Produktivitas adalah 93,47% sedangkan tahun sebelumnya 96,67%, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2023 dan 2024.

RASIO PRODUKTIVITAS PERKARA PERDATA



Gambar 3.6 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2020 – 2024 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.14 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 5	5 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	40	3	0	0	0	43
Jumlah		40	3	0	0	0	43
%		93,02 %	6,98 %	0	0	0	100 %

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkanya Perkara.

Sehingga dari 43 Perkara yang Putus tahun 2024, semua Perkara diselesaikan 100% tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang ingin dicapai adalah 98%, sehingga Realisasi **Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu** adalah **102,04%**

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor :

- Keseriusan dan komitmen Pimpinan dan seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengawasan penanganan perkara dan penginputan SIPP yang diawasi oleh Hakim Pengawas Bidang Pidana, serta Satgas SIPP yang selalu mengingatkan penginputan SIPP dengan menggunakan aplikasi MIS dan EIS sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian target menjadi terpacu bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya

- Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan
- Pimpinan memberikan *reward* dan *punishment*
- Mengatur skema pelaksanaan jadwal persidangan yang tepat baik di dalam kota maupun di luar kota

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA INDIKATOR PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, jumlah Panitera, Panmud dan Panitera Pengganti sebanyak 5 orang

Dengan penanganan perkara di Kabupaten Pulang Pisau terlihat bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat proporsional sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan profesional.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA INDIKATOR PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Kebhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:

1. Mengatur jadwal persidangan yang tepat baik persidangan
2. Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan yang mendorong peningkatan budaya kinerja organisasi yang lebih baik
3. Memberlakukan *reward* dan *punishment* agar setiap personil terpacu dalam penyelesaian perkara
4. Melakukan pengawasan berjenjang, hingga hasil pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung persidangan
6. Mengoptimalkan penggunaan DIPA 03 untuk mendukung penyelesaian perkara pidana
7. Mengoptimalkan pengawasan SIPP melalui Satgas SIPP

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* meliputi perkara pidana biasa yang berjumlah 13 perkara, terdapat 2 perkara yang berhasil diupayakan secara *restorative justice* dan perkara anak (diversi) yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif* dengan jumlah putusan pidana anak.

Tabel 3.15 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	15 %	15,38 %	102, 56%	-	-	-	-

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara

sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.16. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2024

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2023	0
2.	Masuk 2024	2
3.	Putus 2024	2
4.	Sisa 2024	0

Beban perkara pidana khusus anak Tahun 2024 sebanyak 2 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkoba dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

- Belum adanya perkara pidana yang diajukan untuk *restorative justice* Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya
- Meskipun belum ada perkara yang diajukan untuk restoratif justice namun Pengadilan tetap mengusulkan Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun Panitera Pengganti untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat penanganan perkara untuk dilakukan *restorative justice*
 - Mensosialisasikan *restorative justice* di Pengadilan melalui medsos

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDIKATOR JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Dalam pencapaian target, Pengadilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 terus mengusulkan Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun Panitera pengganti untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat penanganan perkara untuk dilakukan *restorative justice*

**ANALISIS PROGRAM KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
INDIKATOR JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi penanganan perkara pidana untuk dilaksanakan *restorative justice* dalam rapat bulanan maupun sosialisasi di medsos
2. Mengirimkan Hakim untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat penanganan perkara anak

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.17. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84,00 %	84,75 %	104,47	100,89	122,13	126,24	128,04

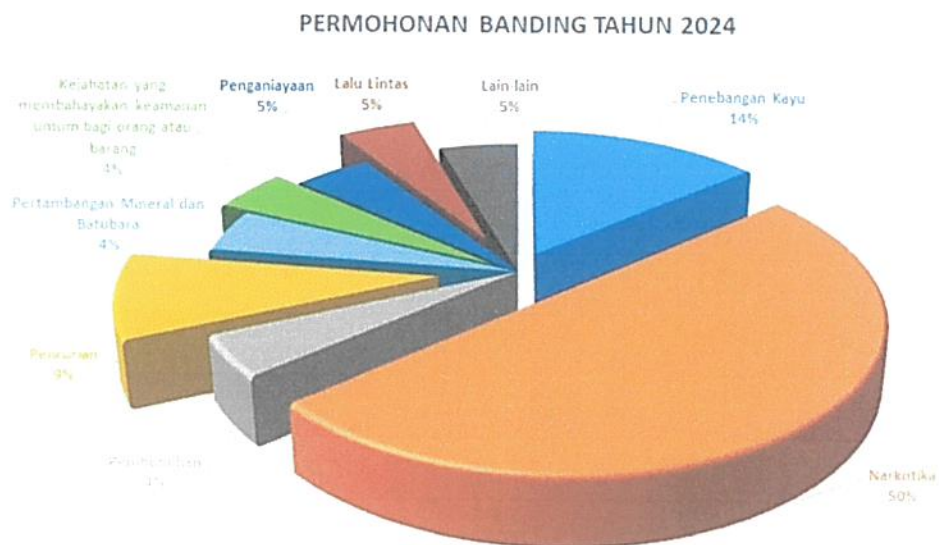
Perkara dimohonkan Banding selama tahun 2024 berjumlah 22 perkara, yang terdiri dari 22 Perkara Pidana dan 0 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Banding selama tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel 2. Sebagai berikut:

Tabel 3.18 : Perkara Upaya Hukum Banding

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara
1	78/Pid.B/LH/2023/PN Pps	Penebangan Kayu
2	88/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
3	80/Pid.Sus/2023/PN Pps	Lain-lain
4	6/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika

5	3/Pid.B/2024/PN Pps	Pembunuhan
6	10/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
7	20/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
8	35/Pid.B/2024/PN Pps	Pencurian
9	25/Pid.Sus/2024/PN Pps	Pertambangan Mineral dan Batubara
10	24/Pid.B/2024/PN Pps	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang
11	34/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
12	41/Pid.B/LH/2024/PN Pps	Penebangan Kayu
13	40/Pid.B/LH/2024/PN Pps	Penebangan Kayu
14	50/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
15	51/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
16	56/Pid.B/2024/PN Pps	Pencurian
17	48/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
18	49/Pid.B/2024/PN Pps	Penganiayaan
19	57/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
20	59/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika
21	73/Pid.Sus/2024/PN Pps	Lalulintas
22	71/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika

Sehingga dapat digambarkan Permohonan banding selama tahun 2024 sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 3.7. Permohonan Banding Selama tahun 2024

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024 sebanyak 128 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 22 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 108 perkara (84,37 %). Target yang ditetapkan sebesar 84 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,44%.

Tabel 3.19
Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	91	37	128
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	22	0	22
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	69	37	106
Realisasi (%)	75,82	100,00	84,37

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor:

- Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah berhasil memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
- Banyaknya Hakim dan Panitera Pengganti yang mengikuti pelatihan membuat Sumber Daya Manusia semakin profesional

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya:

- Mengusulkan Aparatur Pengadilan untuk mengikuti diklat-diklat teknis khususnya di bidang penanganan perkara agar semakin profesional

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

- Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Jumlah Panitera, Panmud dan Panitera Pengganti sebanyak 5 orang
- Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik telah dioptimalkan untuk mendukung kinerja penanganan perkara

Dengan penanganan perkara di Kabupaten Pulang Pisau terlihat bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat proporsional sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan profesional.

**ANALISIS PROGRAM KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

- Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:
 1. Mengatur jadwal persidangan yang tepat baik persidangan
 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung persidangan
 3. Mengoptimalkan penggunaan DIPA 03 untuk mendukung penanganan penyelesaian perkara
 4. Mengoptimalkan pengawasan SIPP melalui Satgas SIPP
 5. Menugaskan Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengikuti diklat teknis

Dari program diatas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator Kinerja 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.20. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	91,40 %	101,56 %	104,52	114,59	119,82	119,44

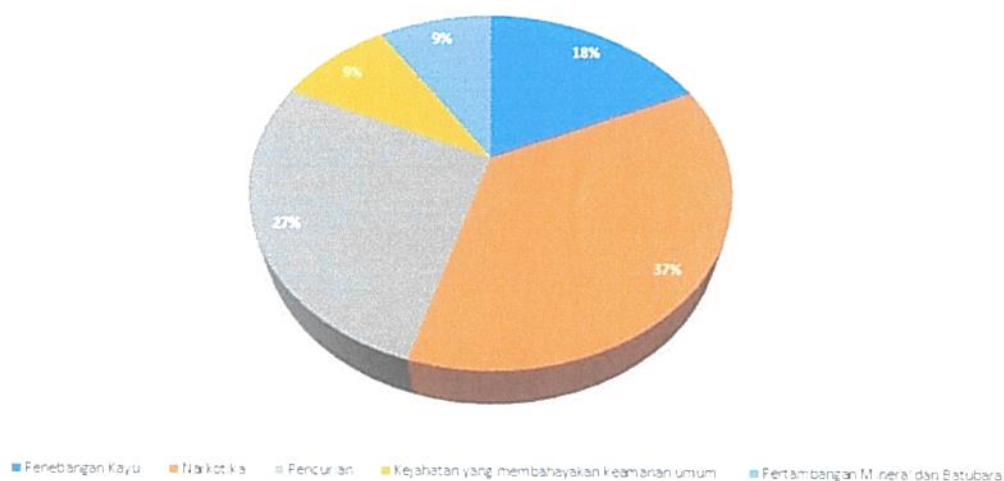
Perkara dimohonkan Kasasi selama tahun 2024 berjumlah 11 perkara, yang terdiri dari 11 Perkara Pidana dan 0 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Kasasi selama tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perkara Kasasi Selama Tahun 2024

Nomor Perkara PN	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Kasasi
68/Pid.B/2023/PN Pps	Pencurian	15 Januari 2024
74/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika	21 Februari 2024
76/Pid.Sus/ 2023/PN Pps	Narkotika	27 Februari 2024
23/Pid.B/2024/PN Pps	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	19 Juni 2024
35/Pid.B/2024/PN Pps	Pencurian	30 Juni 2024
34/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika	1 Agustus 2024
25/Pid.Sus/2024/PN Pps	Pertambangan Mineral dan Batubara	5 Agustus 2024
41/Pid.B/LH/2024/PN Pps	Penebangan Kayu	4 Oktober 2024
40/Pid.B/LH/2024/PN Pps	Penebangan Kayu	4 Oktober 2024
50/Pid.Sus/2024/PN Pps	Narkotika	4 November 2024
56/Pid.Sus/2024/PN Pps	Pencurian	20 November 2024

Sehingga dapat digambarkan Permohonan Kasasi selama tahun 2024 sebagaimana pada gambar berikut.

PERMOHONAN KASASI TAHUN 2024



Gambar 3.8. Permohonan Kasasi Selama tahun 2024

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 sebanyak 128 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 perkara dan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 117 perkara (91,40 %). Target yang ditetapkan sebesar 90 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,55 %.

Tabel 3.22 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2024

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau	91	37	128
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	11	0	11
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	80	37	117
Realisasi (%)	87,91 %	100,00 %	91,40 %

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor :

- Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah berhasil memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
- Banyaknya Hakim dan Panitera Pengganti yang mengikuti pelatihan membuat Sumber Daya Manusia semakin profesional

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya

- Mengusulkan Aparatur Pengadilan untuk mengikuti diklat-diklat teknis khususnya di bidang penanganan perkara agar semakin profesional

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

- Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, jumlah Panitera, Panmud dan Panitera Pengganti sebanyak 5 orang
- Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik telah dioptimalkan untuk mendukung kinerja penanganan perkara

Dengan penanganan perkara di 1 Kabupaten yaitu Pulang Pisau terlihat bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat proporsional sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan profesional

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

- Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:
 1. Mengatur jadwal persidangan yang tepat baik persidangan
 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung persidangan
 3. Mengoptimalkan penggunaan DIPA 03 untuk mendukung penanganan penyelesaian perkara
 4. Mengoptimalkan pengawasan SIPP melalui Satgas SIPP
 5. Menugaskan Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengikuti diklat teknis

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator Kinerja 6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.23 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,10 %	0,00 %	-	-	-	-	-

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.24 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	2	0	0	0	0

Beban perkara pidana anak Tahun 2024 sebanyak 2 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0 %.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- a. Sedikitnya Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2024 yang hanya 2 perkara
- b. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- c. Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan.
- d. Kurangnya sosialisasi terhadap aparaturnya penegak hukum.
- e. Tidak semua perkara anak dapat dilakukan DIVERSI (Pengulangan dan Tindak Pidana dengan ancaman lebih dari 7 Tahun)

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- b. Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI
Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor: - Didukung SDM yang berkompeten yakni Hakim yang telah tersertifikasi untuk melaksanakan proses diversi di Pengadilan. Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya - Mengusulkan SDM Pengadilan untuk dilatih mengikuti diklat penanganan perkara anak yang dilakukan diversi agar semakin profesional

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDIKATOR PERKARA PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI
- Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, jumlah personil Hakim sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang telah memiliki sertifikasi penanganan perkara anak Sehingga kemampuan SDM dan professional hakim sangat dioptimalkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**ANALISIS PROGRAM KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
INDIKATOR PERKARA PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI**

Keberhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:

- Melakukan sosialisasi penanganan perkara anak dan diversi lewat medsos
- Mengirimkan Hakim untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat penanganan perkara anak

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 7 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.25 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3,885	104,59	104,59	102,35	122,51	118,84

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3,75	3,885	103,60

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,75 melalui hasil survei yang dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi.

**Tabel 3.27. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,786	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,750	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,821	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,821	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,821	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,821	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,821	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,857	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,929	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,756	Sangat Baik

**Tabel 3.28. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,969	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,938	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,969	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,969	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,969	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	4,000	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	4,000	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,748	Sangat Baik

**Tabel 3.29. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,833	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,700	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,767	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,967	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,933	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,933	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,967	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,84	Sangat Baik

**Tabel 3.30. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,800	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,767	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,667	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,933	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,767	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,833	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,833	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,900	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,867	Sangat Baik

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2024 adalah 3,80 dengan capaian 102,70 %.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi Kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor :

- Petugas PTSP yang profesional yang secara rutin dilatih dan dievaluasi secara berkala
- SOP Pelayanan PTSP telah dilaksanakan dengan baik dan tepat
- Adanya mekanisme kompensasi keterlambatan pelayanan
- Pelayanan telah menerapkan sistem IT sehingga menjadi lebih cepat

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya

- Mengusulkan SDM Pengadilan untuk dilatih mengikuti diklat pelayanan PTSP
- Mengembangkan sistem IT yang berbasis pelayanan

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

INDIKATOR INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

- Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mempunyai PTSP yang terdiri dari loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan, loket Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Hukum, Perdata, Pelayanan Pojok e-Court, serta loket Posbakum yang terletak di PTSP sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Pemanfaatan sistem pelayanan yang berbasis IT membuat pelayanan semakin mudah dan cepat

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA INDIKATOR INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Kebhasilan pencapaian target Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Briefing PTSP yang dilakukan setiap pagi dan sore
2. Sosialisasi SOP pelayanan secara berkala yang dilakukan dalam rapat
3. Pelatihan Petugas PTSP secara berkala agar semakin profesional
4. Peningkatan pengawasan oleh Supervisor dan Hakim Pengawas PTSP sebagai langkah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai 110,54%. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %	0 %	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				103,09 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis II Tahun 2024:

Indikator Kinerja 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan Pidana yang dikirim ke para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan Pidana yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.32 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)					
			2024	2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00	100,00	103,09	103,09	104,17	104,17	102,77	86,82

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Tahun 2024 sebanyak 134 perkara. Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi mengalami sama dengan tahun 2023 yang persentasenya 103,09%.

Tabel 3.33 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (Dalam hari)		Jumlah
		<14 Hari	> 14 Hari	
1	Pidana	91	0	91
	Jumlah	91	0	91
	%	100 %	0 %	100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2024 sebanyak 91 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 91 perkara (100 %).

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor:

- Semakin profesionalnya Aparatur Pengadilan Negeri Pulang Pisau khususnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- Pengawasan berjenjang telah dilaksanakan secara maksimal
- Komitmen Pimpinan dalam pencapaian target telah dilaksanakan secara maksimal

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya:

- Bagian Kepaniteraan Perdata selalu memantau penginputan perkara SIPP sampai dengan putusan sehingga ketika perkara tersebut putus, petikan putusannya dapat langsung disampaikan kepada para pihak tepat waktu oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

- Sumber Daya Manusia di bidang Kejurusitaan terdiri dari 1 orang Juru Sita untuk melaksanakan pemberitahuan petikan atau salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap penginputan relas panggilan Juru Sita pada aplikasi SIPP

Dengan Penanganan Perkara terlihat bahwa Sumber Daya, baik orang, material, serta pemanfaatan teknologi informasi telah dioptimalkan secara maksimal.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Kebhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:

1. Mengatur jadwal pemberitahuan petikan atau salinan putusan yang dilakukan oleh Juru Sita agar lebih optimal
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Juru Sita berdasarkan SOP yang berlaku
3. Memberlakukan *reward and punishment* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen Pengadilan

Pada program tersebut, terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan Perdata yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan putusan Perdata dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian

ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.34 : Persentase Salinan Putusan Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)					
			2024	2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00	100,00	103,09	103,09	104,17	104,17	102,77	86,82

Jumlah perkara Perdata yang telah diminutasi pada Tahun 2024 sebanyak 43 perkara. Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi sama jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang persentasenya 103,09%.

Tabel 3.35 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Perdata Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (Dalam hari)		Jumlah
		<14 Hari	> 14 Hari	
1	Perdata	43	0	43
	Jumlah	43	0	43
	%	100 %	0 %	100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2024 sebanyak 43 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 43 perkara (100 %).

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI
Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor : - Semakin profesionalnya Aparatur Pengadilan Negeri Pulang Pisau khususnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan - Pengawasan berjenjang telah dilaksanakan secara maksimal - Komitmen Pimpinan dalam pencapaian target telah dilaksanakan secara maksimal Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya: - Bagian Kepaniteraan Pidana selalu memantau penginputan perkara SIPP sampai dengan putusan sehingga ketika perkara tersebut putus, petikan putusannya dapat langsung disampaikan kepada para Pihak tepat waktu oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti

**ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA
SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU**

- Sumber Daya Manusia di bidang kejurusitaan terdiri dari 1 orang Jusu Sita untuk melaksanakan pemberitahuan petikan atau salinan putusan kepada para Pihak secara tepat waktu
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran DIPA 03 khususnya untuk pelaksanaan tugas Kejurusitaan
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap penginputan relaas panggilan Jusu Sita pada aplikasi SIPP

Dengan penanganan perkara terlihat bahwa Sumber Daya, baik orang, material, pendanaan DIPA 03, serta pemanfaatan teknologi informasi telah dioptimalkan secara maksimal.

**ANALISIS PROGRAM KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU**

Kebhasilan pencapaian target pada pengadilan negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya:

1. Mengatur jadwal pemberitahuan petikan atau salinan putusan yang dilakukan oleh Juru Sita agar lebih optimal
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Juru Sita berdasarkan SOP yang berlaku
3. Memberlakukan *reward and punishment* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen Pengadilan

Dari program diatas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.36 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,1%	0,0%	0	0	370,33	119,00	270.50

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Tahun 2024 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasinya sebesar 0 % dan tidak ada capaian, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	6	0	6	0	0
	Jumlah	6	0	6	0	0
	Persentase (%)		0 %	100 %	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan, disamping itu ada beberapa mediator yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga tidak mencapai sasaran.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja belum tercapai dikarenakan beberapa faktor :

- Para pihak berperkara tidak sepakat untuk berdamai melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator
- Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya:
- Mengusulkan SDM Pengadilan untuk mengikuti diklat Mediasi Lanjutan
- Melakukan sosialisasi baik secara konvensional maupun media sosial.

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Dalam menangani mediasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 8 Hakim yang telah bersertifikasi untuk melakukan mediasi atau sebagai Mediator perkara perdata. Sehingga, secara profesional kemampuan personil Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak perlu diragukan lagi karena telah tersertifikasi namun, upaya maksimal yang telah dilakukan Mediator belum berhasil.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Kebhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya

1. Melakukan sosialisasi tentang Mediasi di Pengadilan baik secara konvensional maupun melalui media sosial
2. Mengirimkan Hakim untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat mediasi atau Mediator perkara perdata

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100,00 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.39 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)					
			2024	2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.40 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2024

Nama Pengadilan	Tahun	Jumlah Layanan Perkara
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2019	-
	2020	-
	2021	-
	2022	-
	2023	-
	2024	3

Selama tahun 2024 ada 3 Perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;

Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.41 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)					
			2024	2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100%	-	-	-	-	-

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Tabel 3.42 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2019	-	-
	2020	-	-
	2021	-	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	12	12

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri pulang Pisau adalah 12 perkara.

Indikator Kinerja 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.43 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)					
			2024	2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.44 : Data Layanan Posbakum Tahun 2019- 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Layanan (Orang)
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2019	-
	2020	6
	2021	5
	2022	2
	2023	79
	2024	57

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi Kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja sesuai ini dikarenakan beberapa faktor:

- MoU antara Pengadilan Negeri Pulang Plsau dengan lembaga yang dipercaya untuk melayani Posbakum di PTSP Pengadilan Negeri Pulang Plsau telah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
- Keseriusan serta komitmen Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Plsau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pencari Keadilan yang datang langsung melalui PTSP Pengadilan Negeri Pulang Plsau membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Pulang Plsau telah menjalankan visi dan misi sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Posbakum di loket Posbakum PTSP Pengadilan Negeri Pulang Plsau menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya pencapaian target kinerja.

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya:

- Selalu mengevaluasi pelaksanaan Posbakum dalam 1 tahun terakhir
- Menyeleksi Lembaga atau Pihak Advokat yang berkompeten dalam melaksanakan tugas di Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Plsau

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Dalam pencapaian target, Pengadilan Negeri Pulang Plsau Tahun 2024, Pengadilan Negeri Pulang Plsau melakukan MoU pelaksanaan Posbakum Mustika Bangsa.

Pelaksanaan Posbakum telah didukung dengan anggaran DIPA 03 untuk 1 tahun berjalan.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Kebhasilan pencapaian target Pada Pengadilan Negeri Pulang Plsau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya

1. Pelaksanaan MoU antara Pengadilan Negeri Pulang Plsau dengan Lembaga Pelaksana Posbakum
2. Kepaniteraan Hukum selalu memberikan laporan tentang pelaksanaan Posbakum yang berjalan kepada Hakim Pengawas Hukum dan PTSP untuk diteruskan ke Koordinator Pengawasan selanjutnya untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Plsau
3. Laporan Pelaksanaan Posbakum dilaporkan juga melalui aplikasi Pelaporan Badilum Mahkamah Agung RI yang dilaporkan oleh Kepaniteraan Hukum

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Plsau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai 100,00 %. Indikator pada sasaran strategis ini sama dengan indikator tahun sebelumnya yaitu 100%.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.46 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)					
			2024	2023	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95,00%	100,00%	105,26	105,26	111,11	111,11	111,41	111,41

Jumlah perkara perdata yang putus selama tahun 2024 berjumlah 43 Perkara, sementara Perkara yang mengajukan Upaya Hukum berjumlah 0 Perkara dan 43 Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 43 perkara (100,00%) sehingga capaian pada Tahun 2024 sebesar 105,26 %.

Tabel 3.47 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	43	0	0
Jumlah	43	0	0

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

ANALISIS SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja membuat capaian kinerja semakin meningkat ini dikarenakan beberapa faktor:

- Komitmen Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan percepatan pelaksanaan putusan perkara perdata untuk ditindaklanjuti atau dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Evaluasi serta rapat berjenjang untuk menanganani putusan yang akan dieksekusi telah dilaksanakan secara maksimal
- Koordinasi yang berjalan dengan baik antara pihak Pengadilan dengan Aparat Keamanan untuk menjamin pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan lancar

Alternatif solusi untuk mendorong keberhasilan pencapaian target diantaranya:

- Peran aktif Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Kepaniteraan Perdata, serta Panitera dalam penanganan perkara yang akan dieksekusi harus dioptimalkan dengan tahap-tahap maupun SOP pelaksanaan eksekusi yang sesuai aturan sehingga seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut mengetahui pelaksanaan eksekusi.

ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI)

Dalam pencapaian target, personil Juru Sita maupun Juru Sita Pengganti yang akan melaksanakan eksekusi perkara perdata berjumlah 1 orang Juru Sita.

Publikasi biaya eksekusi melalui media sosial serta papan pengumuman pengadilan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat terkait biaya maupun tahap-tahap eksekusi.

Pelaporan data perkara yang akan dieksekusi maupun yang telah dieksekusi dilaporkan secara berkala ke Badan Peradilan Umum.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI)

Kebhasilan pencapaian target pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak terlepas dari beberapa program program kegiatan yang dilakukan pada tahun diantaranya

1. Koordinasi antara pihak Pengadilan dengan Aparat Keamanan (Polisi)
2. Rapat internal terkait pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Juru Sita maupun Juru Sita Pengganti
3. Pemahaman akan SOP Pelaksanaan Eksekusi menjadi sangat penting agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

Dari program di atas terlihat komitmen dan keseriusan Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pencapaian target untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang melampaui target yaitu sebesar 105,26 %.

SASARAN V. TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau salah satunya adalah dengan ketersediaan Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Tugas sehari-hari Pengadilan. Untuk memenuhi itu, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menyusun 2 Program Anggaran untuk mendukung hal itu, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini kemudian di uraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Program Dukungan Manajemen kemudian menjadi DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Kode Satuan Kerja 401920, sedangkan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kemudian menjadi DIPA Badan Peradilan Umum dengan Kode Satuan Kerja 402026.

Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keberhasilan mengukur sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator Persentase realisasi anggaran.

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Realisasi Anggaran baik Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi maupun DIPA Badan Peradilan Umum.

Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98,00 %	99,57 %	101,60%

Adapun Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.49 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	4,085,467,000	4,072,200,781	99.68 %
	Program Dukungan Manajemen	4,085,467,000	4,072,200,781	99.68 %
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	193,593,000	192,531,715	99.45%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	193,593,000	192,531,715	99.45%
TOTAL		4.279.058.000	4.264.732.496	

Realisasi Anggaran tahun 2024 untuk DIPA BUA adalah 4,072,200,781 dari Pagu 4,085,467,000 atau 99,68%, sedangkan DIPA BADILUM dengan realisasi 192,531,715 dari Pagu 193,593,000 atau 99,45%, sehingga rerata Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah 99,57%. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 98%, sehingga capaian Indikator Realisasi Anggaran 101,60 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Nasional tahun 2024 adalah Terus Bertumbuh dan Melaju. Salah satu Upaya Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam upaya untuk Mengikuti Capaian Kinerja Nasional adalah dengan bertransformasi dalam Pengembangan Dunia Digital dalam hal Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan dan Stakeholder seperti terobosan E-Court, E-Berpadu, E-PTSP, ERATERANG dan Transformasi Digital Lainnya.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor berikut ini:

- Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Indikator-indikator Kinerja
- Terdapatnya Aplikasi E-Kinerja yang bisa dilakukan untuk memonitor secara berkala Capaian Indikator secara realtime
- Penyusunan Court Calender sangat membantu untuk keberhasilan Indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Adanya Aplikasi Internal seperti MIS memudahkan untuk memonitor Indikator Penyampaian Salinan Putusan agar Pengiriman Tepat Waktu

- Rapat secara berkala dalam Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran menyebabkan Indikator Realisasi Anggaran sesuai target.
- Adanya Upaya Tindak Lanjut terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan Melakukan Revisi terhadap Perjanjian Kinerja.

Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja disebabkan sebagai berikut:

- Mediasi melibatkan para Pihak yang berperkara, sehingga hasil Pencapaian tergantung dari berhasil atau tidaknya Perkara yang di mediasi. Selama tahun 2024 Mediasi yang dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan indikator ini tidak dapat dicapai, sehingga terdapat revisi pada Indikator ini.

5. Capaian Kinerja Lainnya

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Pelaksanaan Anggaran, mendapatkan Nilai Capaian Kinerja yang tercermin di dalam Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan dengan Nilai 47,63 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) 401920, dan 45,24 untuk DIPA Badan Peradilan Umum.

Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan Nilai “Baik” Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) 401920 dan “Baik” untuk DIPA Badan Peradilan Umum.



Gambar 3.9. Nilai Kinerja Anggaran DIPA BUA



Gambar 3.10. Nilai Kinerja Anggaran DIPA BADILUM

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 4.279.058.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), adapun realisasinya sejumlah Rp. 4.264.732.496,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan persentase rerata (99,57%), dengan demikian sisa anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejumlah Rp. 14.325.504,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) rincian laporan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.50 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	4,085,467,000	4,072,200,781	99.68 %
	Program Dukungan Manajemen	4,085,467,000	4,072,200,781	99.68 %
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	193,593,000	192,531,715	99.45%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	193,593,000	192,531,715	99.45%
	Jumlah	4.279.058.000	4.264.732.496	

1. REALISASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen tahun 2024 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 4,085,467,000 yang kemudian terealisasi Rp. 4,072,200,781 atau 99,68%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.51 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024
Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2,967,151,000	2,954,325,019	99,57	12,825,981
2	BELANJA BARANG	1,118,316,000	1,117,875,762	99.96	440,238
	JUMLAH	4,085,467,000	4,072,200,781	99,68	13,266,219

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 Kegiatan yaitu kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Pagu 4,085,467,000 dan Realisasi 4,072,200,781 atau 99,68 % yang terdiri dari:

1. Layanan Perkantoran yang terdiri :
 - a. Gaji dan Tunjangan dengan pagu 2,967,151,000 dan Realisasi 2,954,325,019 atau 99.57 %
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Dengan Pagu 1,118,316,000 dan terealisasi 1,117,875,762 (99.96 %)

Adapun Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

2. REALISASI PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2024 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 193,591,000 yang kemudian terealisasi Rp. 192,531,715 atau 99,45%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.52 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per
Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026)**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI					
2	BELANJA BARANG	193,591,000	192,531,715	99.45%	1,059,285	0,55 %
	JUMLAH					

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Anggaran 193,591,000. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rincian, yaitu:

- a. Koordinasi Dukungan Penyelesaian Perkara Berupa Kimwasmat Pagu Anggaran 1,500,000 dan terealisasi 1,440,000 (96,00%)
- b. Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pagu Anggaran 57,500,000 dan terealisasi 57,360,600 atau 99.76 %
- c. Layanan Pos Bantuan Hukum dengan pagu Anggaran 28,000,000 dan terealisasi 27,996,000 atau 99.99%
- d. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu Anggaran 1,340,000 dan terealisasi 860,000 atau 64.18%
- e. Sidang di luar Gedung Pengadilan dengan pagu Anggaran 105,251,000 dan terealisasi 104,875,115 atau 99.64%

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp. 1.340.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp. 860.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 64,18 %.

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 105.251.000,- (Seratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 12 perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 104.875.115,- (Seratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) atau 99,64 %.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 28,000,000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang telah memberikan layanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 240 jam layanan, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 27.996.000- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau 99,99 %.

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 – 2024 dapat tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.53 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2024

No	Tahun	DIPA	Pagu	Realisasi	%
1	2019	BUA	2,806,670,000	2,787,811,078	99.33
		BADILUM	63,700,000	63,414,950	99.55
2	2020	BUA	9,895,023,000	9,837,709,851	99.42
		BADILUM	68,550,000	61,266,000	89.37
3	2021	BUA	27,910,592,000	27,448,781,621	98.35
		BADILUM	78,945,000	77,099,300	97.66
4	2022	BUA	7,617,002,000	7,599,600,910	99.77
		BADILUM	65,500,000	64,892,900	99.07
5	2023	BUA	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21
		BADILUM	93,000,000	92,833,000	99.82
6	2024	BUA	4,085,467,000	4,072,200,781	99,68
		BADILUM	193,591,000	192,531,715	99,45

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ke kas negara sebesar Rp. 3,793,000 yang terdiri atas pendapatan PNBP Fungsional (DIPA 03) sebesar Rp. 3,793,000. PNBP Fungsional (DIPA 03) berasal dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (akun 425232) Sebesar Rp. 10,000, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (akun 425239) Sebesar Rp. 2,493,000, Pendapatan Ongkos Perkara (Akun 425233) Rp. 1,290,000.

Tabel 3.54 PNPB DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2024

No	Tahun	DIPA	Realisasi Pendapatan
1	2019	BUA	9,851,222
		BADILUM	5,945,100
2	2020	BUA	185,398
		BADILUM	4,081,000
3	2021	BUA	20,391,877
		BADILUM	7,043,000
4	2022	BUA	0
		BADILUM	4,245,000
5	2023	BUA	51,769,354
		BADILUM	8,484,000
6	2024	BUA	0
		BADILUM	3,793,000

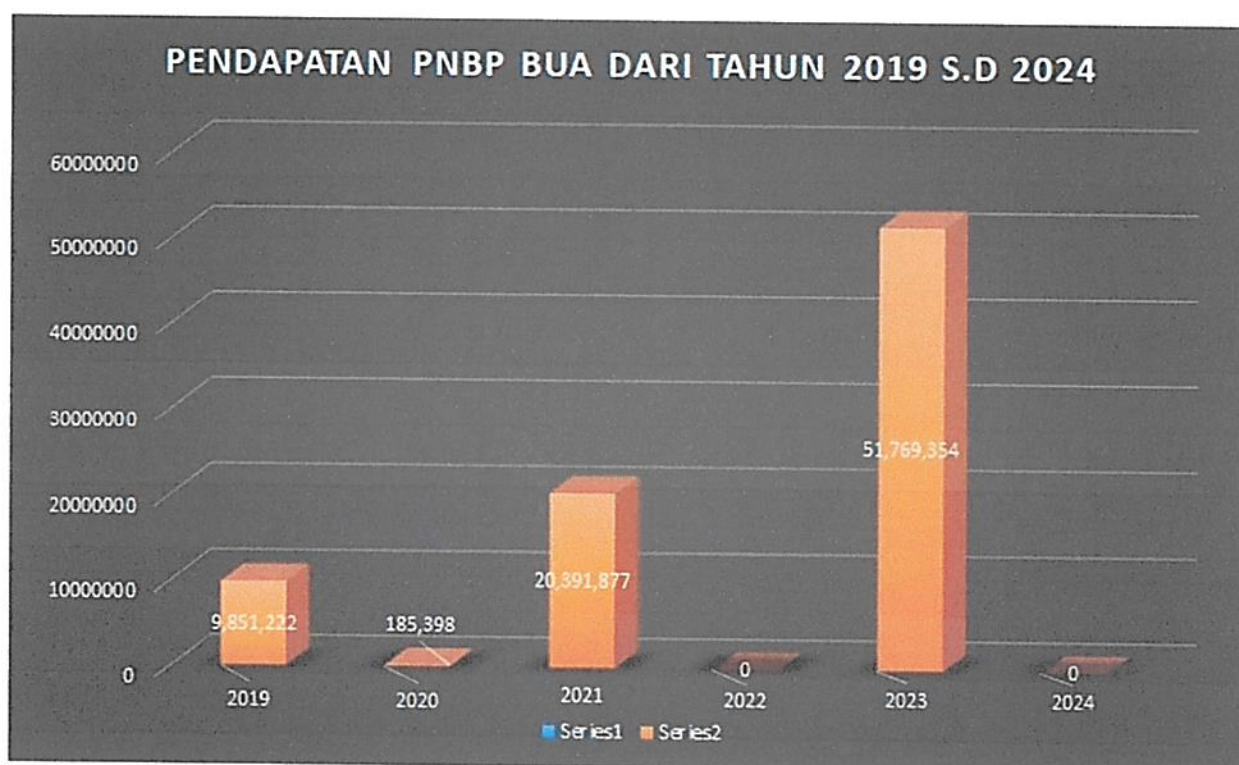


Gambar 3.11 : Grafik Realisasi PNPB Tahun 2019 - 2024

Realisasi PNPB Fungsional sebesar Rp. 3,793,000,00 berupa Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya selama tahun 2024.

Tabel 3.55 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Tahun	DIPA	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Total
1	2019	BUA		1,110,000		8,472,200	269,022	9,851,222
2	2020	BUA		185,398				185,398
3	2021	BUA	20,391,877					20,391,877
4	2022	BUA						0
5	2023	BUA			51,769,354			51,769,354
6	2024	BUA						0



Gambar 3.12. Grafik Realisasi PNBP DIPA BUA Tahun 2019 – 2024

Tabel 3.56 : PNPB DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Tahun	DIPA	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	Total
1	2019	BADILUM	4,960,100	970,000	15,000	5,945,100	5,945,100
2	2020	BADILUM	2,841,000	1,230,000	10,000	4,081,000	4,081,000
3	2021	BADILUM	5,533,000	1,510,000	0	7,043,000	7,043,000
4	2022	BADILUM	3,235,000	860,000	150,000	4,245,000	4,245,000
5	2023	BADILUM	6,584,000	1,240,000	650,000	10,000	8,484,000
6	2024	BADILUM	2,493,000	1,290,000	10,000	0	3,793,000

PENDAPATAN PNPB BADILUM DARI TAHUN 2019 S.D 2024



Gambar 3.13. Grafik Realisasi PNPB DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2024 Berdasarkan Mata Anggaran

4. KEUANGAN PIHAK KETIGA (BIAYA PERKARA PERDATA)

Sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 berikut kami sajikan Informasi Keuangan Perkara yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.57. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2024	545,500	
2.	Penerimaan tahun 2024	41,013,000	35,818,500
3.	Penggunaan biaya proses 2024	3,350,000	3,350,000
4.	Saldo akhir 2024	5,740,000	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari target yang dicapai pada Tahun 2024, yakni target capaian realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar 98% dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil mencapai realisasi anggaran dengan rerata sebesar 99,57% atau Rp. 4,264,732,496,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari pagu Tahun 2024 sejumlah Rp. 4,279,058,000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 14.325.504,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) dengan persentase (0,43%).



Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi pemantauan e-Kinerja yang tersebar di beberapa aplikasi Internal seperti One-Click dan SIPAPI dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

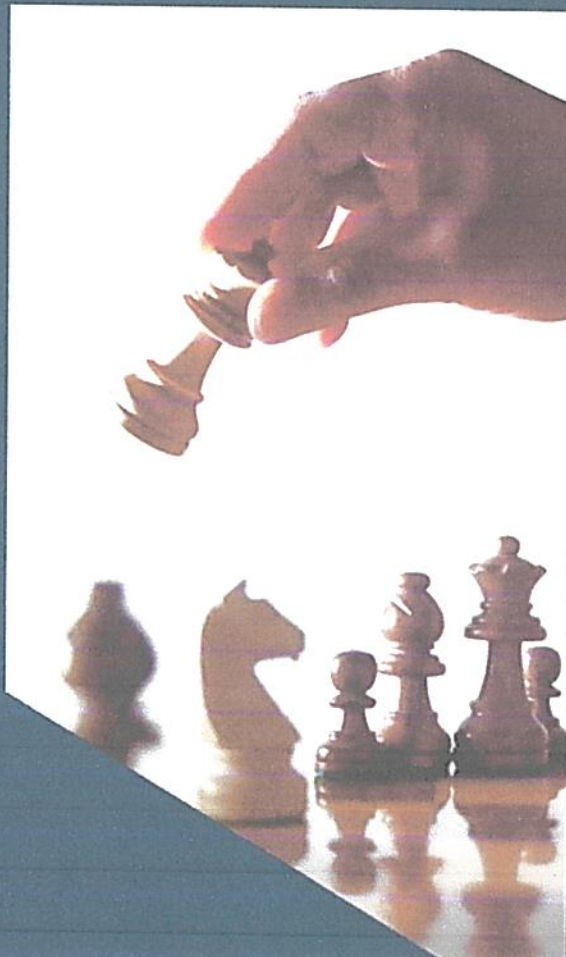
Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pengadilan negeri Pulang Pisau semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Pulang Pisau



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SUJATMIKO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulang Pisau, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

SUJATMIKO, S.H., M.H.

NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.

NIP. 19810108 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN III (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98 %

No	Program	Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.020.467.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	193.591.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata yang Dibiayai oleh Para Pihak	Rp.	26.000.000,-

Pulang Pisau, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



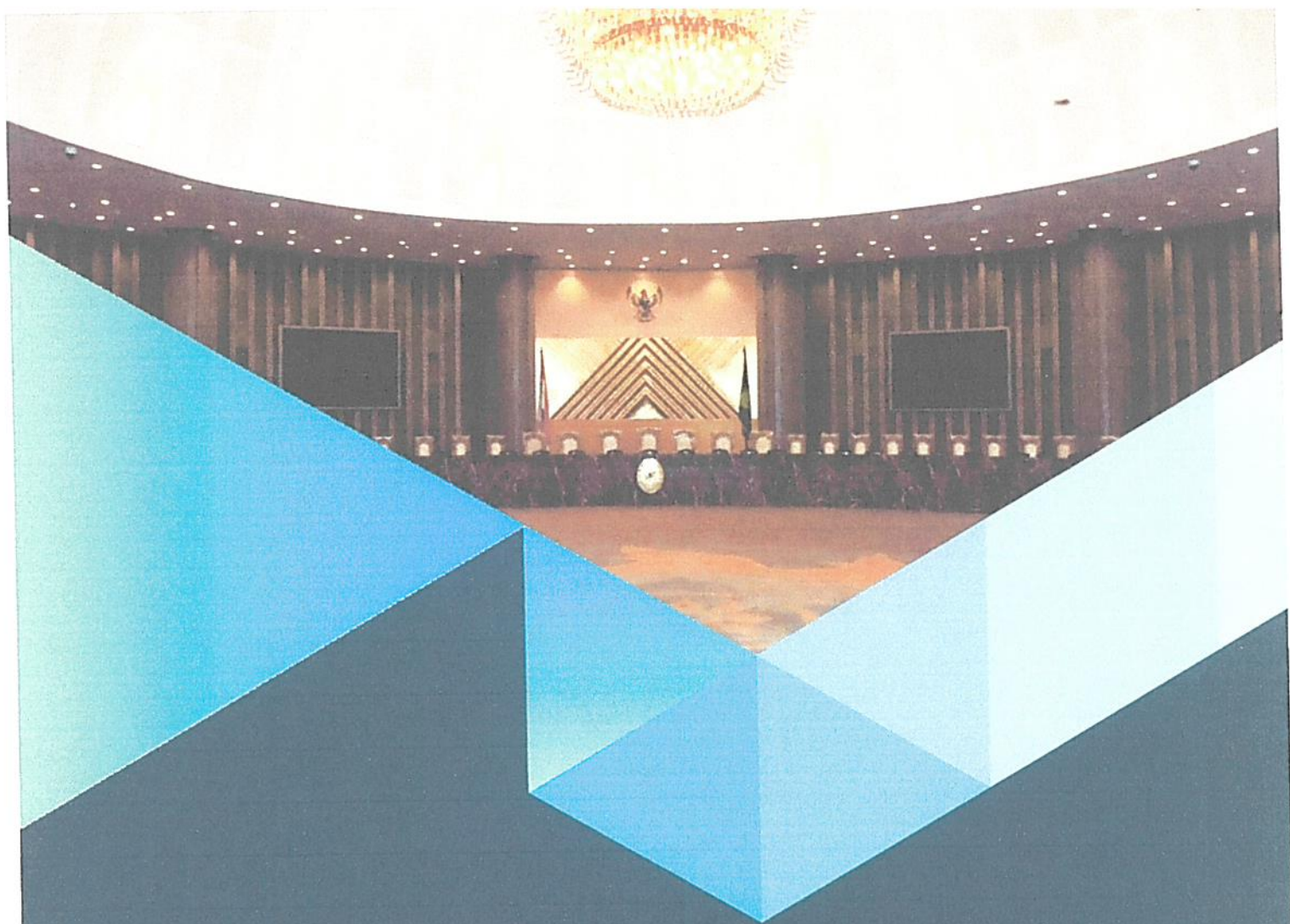
SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.
NIP. 19810108 200312 2 001



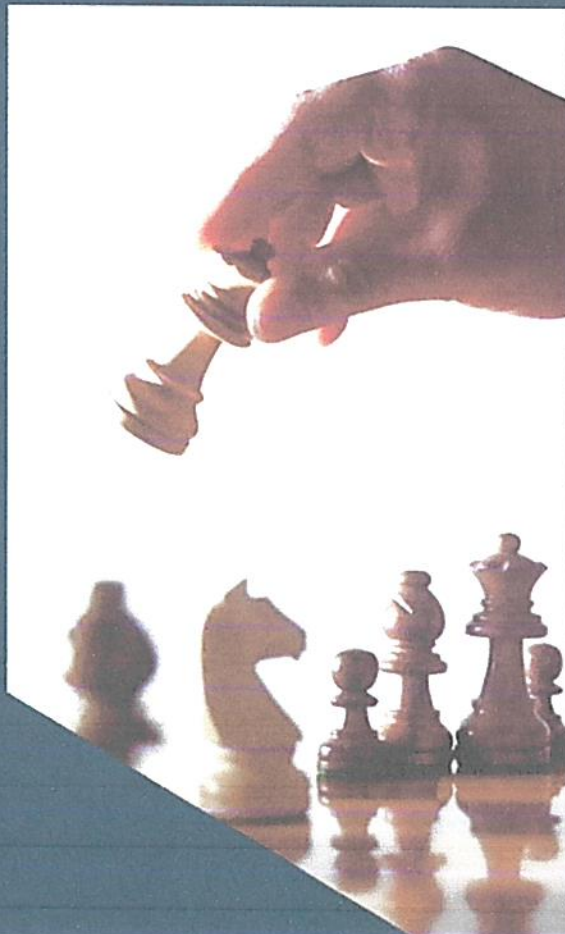
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



4 LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA BULANAN DAN TRIWULANAN TAHUN 2024





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TA 2024



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN.....	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	2
D.	KENDALA.....	7
E.	TINDAK LANJUT.....	7
F.	PENUTUP.....	7



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I TA 2024 dilaksanakan pada hari Rabu 03 April 2024

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 21 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2024= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 26 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I tahun 2024= 89,65%	85 %	89,65%	105,47 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 26 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan I tahun 2024= 89,66 %	90 %	89,66 %	99,61 %	Diatas Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 3.83</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan I tahun 2024= 3.83	3,75	3.83	102,13 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 24 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 5 Perkara</i>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target



		% Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100%				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> <i>Target Mediasi yang berhasil Triwulan I adalah 0.1 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2024= 0	3 %	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2024= 0 %	90 % (Target Triwulan I 0.1 %)	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Target Perkara Diselesaikan Triwulan I TA 2024 1 Perkara atau 6.67 %</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2024= 6.67 %	90 % (Target Triwulan I 6.67 %)	6.67 %	100 %	Sesuai Target



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan I tahun 2024=15 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan I tahun 2024= 15 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I tahun 2024= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan I tahun 2024= 7 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I tahun 2024= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan I tahun 2024= 27,29 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan I tahun 20242022 = 14,34 % Rata-rata Realisasi Triwulan I tahun 2024= 20,82 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 20,8 %	97 % Target Triwulan I : 25 %	20,8 %	83,26 %	Dibawah Target (Target Dibuat 90% - 95%)



D. KENDALA

1. Realisasi Anggaran DIPA BADILUM Dibawah Target dikarenakan pelaksanaan Sidang Keliling Belum Maksimal

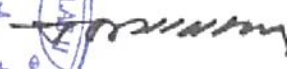
E. TINDAK LANJUT

1. Mengupayakan agar Pelaksanaan Sidang Keliling dapat optimal dan cepat terlaksana

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 03 April 2024
Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKIUDDIN



NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

Hari / Tanggal	:	Rabu, 03 April 2024
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Mohammad Zakiuddin
Notulis	:	Laili Rahmah
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 21 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
	2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target



			Triwulan I tahun 2024= 100.00 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2024= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 26 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I tahun 2024= 89,65%	85 %	89,65%	105,47 %	Diatas Target	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 26 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya	90 %	89,66 %	99,61 %	Diatas Target	



		Hukum Kasasi Triwulan I tahun 2024= 89,66 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 3.83</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan I tahun 2024= 3.83	3,75	3.83	102,13 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 24 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target



		<i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 5 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100%				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> <i>Target Mediasi yang berhasil Triwulan I adalah 0.1 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2024= 0	3 %	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2024= 0 %	90 % (Target Triwulan I 0.1 %)	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Target Perkara Diselesaikan Triwulan I TA 2024 1 Perkara atau 6.67 %</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2024= 6.67 %	90 % (Target Triwulan I 6.67 %)	6.67 %	100 %	Sesuai Target



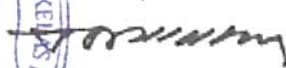
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan I tahun 2024=15 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan I tahun 2024= 15 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I tahun 2024= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
	4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan I tahun 2024= 7 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I tahun 2024= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
	5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan I tahun 2024= 27,29 % Realisasi DIPA BUA (402026) Triwulan I tahun 20242022 = 14,34 % Rata-rata Realisasi Triwulan I tahun 2024= 20,82 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 20,8 %	97 % Target Triwulan I : 25 %	20,8 %	83,26 %	Dibawah Targe
4	Penutup Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.					



PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




MOHAMAD ZAKIUDDIN

NOTULIS



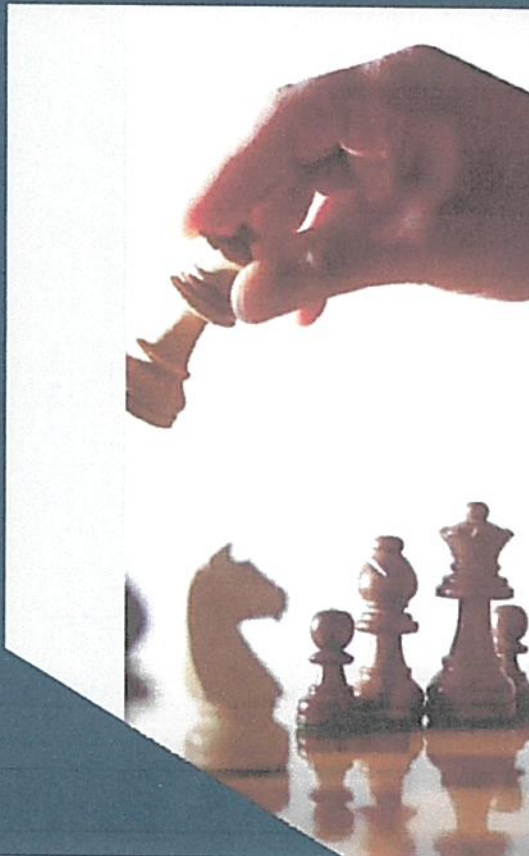
LAILI RAHMAH



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Jl. Trans Kalimantan km.86 Gohong
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
<https://pn-pulangpisau.go.id/>



NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516, Fax (0513) 2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 13 Januari 2025

Nomor : 72.A/KPN.W16-U11/RPT.PTIP/1/2025
Perihal : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Lampiran : -

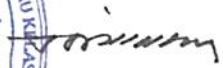
Kepada Yth : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Di -
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Awal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU


MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516, Fax (0513) 2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJIP) TAHUN 2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2025

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOHAMAD ZAKI UDDIN	Penanggung Jawab	
2	NORIPANSYAH	Ketua	
3	I MADE LANDEP	Sekretaris	
4	LELO HERAWAN	Koordinator Validasi Data	
5	NIKEN ANGGI PRAJANTI	Anggota	
6	ISHMATUL LU'LU	Anggota	
7	DEDE ANDREAS	Anggota	
8	REINHARD SIMANJUNTAK	Anggota	
9	LAILI RAHMAH	Anggota	
10	RIVIERA J. MANURUNG, S.H.	Anggota	
11	AROFAH AZHAR	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

NOTULEN RAPAT Penyusunan LKJIP tahun 2023		
Hari / Tanggal	:	Senin, 13 Januari 2025
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Zakiuddin, S.H.
Notulis	:	Lessa Wara'a Ezzana
Peserta Rapat	:	Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
RINGKASAN ACARA		
1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau	
	Hasil Rapat 1. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Menyampaikan SK tentang Tim Evaluator SAKIP dan Tim Penyusunan LKJIP tahun 2024 Nomor 78/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan 79/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024 tentang Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024; 2. Pembahasan tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1884/KPT.W16/RA.1/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewajiban melaporkan Kinerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan; 3. Ketua Tim Evaluator Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau membacakan hasil target capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024; 4. Laporan Kinerja harus sudah dilaporkan paling lambat tanggal 28 Februari 2025; 5. Pengumpulan Dokumen Sumber Keadaan Perkara dikoordinir oleh Kepaniteraan Hukum, sedangkan Dokumen Sumber Kesekretariatan dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan; 6. Dokumen Sumber tersebut di verifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP; 7. Tim Penyusun LkjiP membagi tugas dalam Penyusunan LkjiP dimana Bab I akan di disusun oleh Panitera, Bab II akan Disusun oleh Dede Andreas selaku Panitera Muda Perdata, Bab III tentang Capaian Terkait Keadaan Perkara akan dilaksanakan oleh Lelo Herawan selaku Panitera Muda Hukum, Bab III terkait Realisasi Anggaran akan dilaksanakan oleh Reinhard Simanjuntak selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bab IV akan disusun oleh Laili Rahmah selaku Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Lampiran dan Kompilasi LkjiP akan disusun oleh Arofah Azhar selaku Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;	



8. Seluruh Bab LkjIP paling lambat diserahkan 31 Januari 2025;
9. Kompilasi Laporan LkjIP akan dilaksanakan dari tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan 08 Februari 2025 yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP;
10. Selanjutnya Finalisasi LKJIP akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2025 dan akan dilakukan Penandatanganan LKjIP pada tanggal 12 Februari 2025;
11. Tahap pengiriman LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal yaitu 28 Februari 2025.

Dokumentasi



PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

NOTULIS


LELO HERAWAN





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TA 2024



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN.....	2
B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	2
D. KENDALA	9
E. TINDAK LANJUT	13
F. PENUTUP	14

A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II TA 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 1 Juli 2024.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan II tahun 2024= 23 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus s.d. Triwulan II tahun 2024= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 47 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan II tahun 2024= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus s.d. Triwulan II tahun 2024= 12 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 12 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif s.d. Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan II tahun 2024= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara</i>	85 %	83,05%	97,70 %	Dibawah Target

		Jumlah Perkara Putus Triwulan II tahun 2024= 30 Perkara Jumlah Perkara Putus sd Triwulan II tahun 2024= 59 Perkara Jumlah Perkara yang Banding Triwulan I = 3 Perkara Jumlah Perkara yang Banding Triwulan II = 7 Perkara Jumlah Perkara yang Banding sd Triwulan II Tahun 2024 = 10 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding sd Triwulan II Tahun 2024 = 59 Perkara – 10 Perkara = 49 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan II tahun 2024= 83,05 %				
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2024= 29 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan II tahun 2024= 30 Perkara Jumlah Perkara Putus sd Triwulan II tahun 2024= 59 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi Triwulan I = 3 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi Triwulan II = 1 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 4 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 59 Perkara – 4 Perkara = 55 Perkara	90 %	93,22 %	103,58 %	Diatas Target

		% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan II tahun 2024= 93,22 %				
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan sd Trwiulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sd Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I tahun 2023= 3.83</i> <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II tahun 2023= 3.98</i> <i>Rerata Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat s.d. Triwulan II tahun 2023= (3.83 + 3.98) / 2 = 3,91</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan II tahun 2024= 3.91	3,75	3.91	104,27 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2024= 24 Perkara</i>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target

		<i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan II tahun 2024= 23 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus s.d. Triwulan II tahun 2024= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 47 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 100%				
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan II tahun 2024= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus sd Triwulan II tahun 2024= 12 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 12 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan II tahun 2024= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2024= 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan II tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil s.d. Triwulan II = 0 Perkara</i>	3 %	0 %	0 %	Dibawah target

		<i>Target Mediasi yang berhasil Triwulan II adalah 0.1 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan II tahun 2024= 0				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan sd Triwulan II tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan II tahun 2024= 0 %	90 % (Target Triwulan II 0 %)	0 %	0 %	Sesuai target
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2024= 1 Perkara</i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan II tahun 2024= 5 Perkara</i> Target Perkara Diselesaikan Triwulan II TA 2024 5 Perkara atau 40 % Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan II tahun 2024= 40 %	90 % (Target Triwulan II 40 %)	40 %	100 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Teregister dan Triwulan I tahun 2024=15 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM Teregister dan</i>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

		terlayani Triwulan II tahun 2024= 15 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM Teregister dan Terlayani Triwulan II tahun 2024= 30 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) s.d. Triwulan II tahun 2024= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan II tahun 2024= 7 Perkara Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan II tahun 2024= 7 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan II tahun 2024= 1 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan II tahun 2024 yang ditindaklanjuti = 1 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan II tahun 2024= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) sd Triwulan II tahun 2024= 53,89 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) s.d. Triwulan II tahun 2024 = 51,22 % Rata-rata Realisasi Triwulan II tahun 2024= 52,56 % % Persentase Realisasi Anggaran Triwulan II tahun 2024= 52,56 %	97 % Target Triwulan II : 50 %	52,56 %	105,12 %	Diatas Target

D. ANALISA, PENGUKURAN KINERJA, STRATEGI, KENDALA, SOLUSI DAN TINDAK LANJUT

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	Capaian Diatas Target. Strategi untuk Mempertahankan Capaian 1. Membuat Court Calender agar sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 3. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 4. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang sudah melewati waktu 4 Bulan pada aplikasi E-Kinerja Internal
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0 %	Pengadilan belum ada menerima Perkara yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mengusulkan Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun Panitera Pengganti untuk mengikuti sosialisasi maupun diklat penanganan perkara untuk dilakukan restorative justice 2. Mensosialisasikan Restorative Justice di Pengadilan melalui Media Sosial, Coffee Morning dengan Aparat Penegak Hukum lainnya

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	83,05%	97,70 %	Dibawah Target <i>Strategi untuk meningkatkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.</i>
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	93,22 %	103,58 %	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian dan mengurangi Upaya Hukum Kasasi adalah dengan Membuat Putusan secara Professional agar sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku, sehingga mengurangi upaya Pengajuan Hukum baik Banding maupun Kasasi dari Putusan yang sudah ada. Langkah yang dilakukan secara internal adalah:</i> 1. Mensosialisasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung agar Putusan yang dibuat Sesuai Kerangka Template Putusan yang ada 2. Memberikan Keleluasaan Hakim untuk Melanjutkan Studi
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0 %	Belum adanya Perkara Anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau sehingga belum dapat dilakukan movev
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3.91	104,27 %	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i> 1. Melakukan Movev SKM secara rutin Triwulanan

						2. Menindaklanjuti Hasil MONEV SKM
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i> Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E-Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i> Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E-Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %	0 %	0 %	Sesuai target Untuk Triwulan II Tahun 2024, belum ada Mediasi yang berhasil dilaksanakan, karena tidak ada kesepakatan Upaya yang dilakukan untuk membuat mediasi berhasil adalah sebagai berikut:

						1. Secara Psikologi, untuk membuat kenyamanan mediasi harus didukung oleh ruangan Mediasi yang nyaman, Indah dan nyaman, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah Pengusulan Desain Interior untuk beberapa ruangan Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Khususnya Ruang Mediasi 2. Mendorong Hakim untuk mengikuti Pelatihan Mediator
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 % (Target Triwulan II 0 %)	0 %	0 %	Sesuai target Strategi untuk Meningkatkan Capaian ini : Target Triwulan I adalah 0, Target Triwulan II adalah 0 Mensosialisasikan aplikasi terkait pendaftaran prodeo dan sosialisasi bagi masyarakat, lebih digalakkan.
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 % (Target Triwulan II 40 %)	40 %	100 %	Sesuai Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : Target Triwulan II adalah 40 %. Dan telah terealisasi 40 % atau 100 %
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja POSBAKUM yang ada setiap Bulan 2. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Layanan Posbakum

4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %	100 %	105,26%	Capaian Diatas Target. Strategi untuk Mempertahankan Capaian 1. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 2. Pimpinan Berkomitmen untuk Memnitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 3. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang yang sudah mencatatn BHT pada aplikasi E-Kinerja Internal dan EIS terkait Penginputan BHT
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97 % Target Triwulan II : 50 %	52,56 %	105,12 %	Diatas Target (Target Triwulan II 50 %) Tercapainya target dikarenakan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik antar Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan juga antar Personil Pengelola Keuangan

E. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengupayakan agar Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelaksanaan Realisasi Perkara Prodeo dapat cepat terlaksana, yaitu dengan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat Desa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memperkenalkan Program Sidang Keliling dan Perkara Prodeo, serta penggunaan Aplikasi secara online dalam request atau permintaan Pelaksanaan Sidang Keliling dan Prodeo.
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan program sidang keliling dan prodeo.

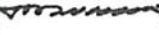
F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 1 Juli 2024

YANG MELAKSANAKAN MONEV
KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,




MOHAMAD ZAKIUDDIN

NOTULIS,


LAILI RAHMAH



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TA 2024



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN.....	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	2
D.	KENDALA.....	7
E.	TINDAK LANJUT.....	11
F.	PENUTUP	12

A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III TA 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 07 Oktober 2024.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i>	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target

		<i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100.00 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2024= 1 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2024= 100 %	0.1 %	100 %		Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 96 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 79 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III tahun 2024= 82,29%	85 %	82,29%	96,81 %	Dibawah Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan</i>	90 %	92,71 %	103,01 %	Diatas Target

		III tahun 2024= 96 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi = 7 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 89 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III tahun 2024= 92,71 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2024= 3.89 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan III tahun 2024= 3.89	3,75	3.89	103,73%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 70 Perkara % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target

	Penyelesaian Perkara	<i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 26 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100%				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2024= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> <i>Target Mediasi yang berhasil Triwulan III adalah 0.1 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2024= 0 %	3 %	0 %	0 %	Dibawah Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan III tahun 2024= 2 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 2 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 100 %	90 %	100 %	111,11 %	Diatas target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan III tahun 2024= 9 Perkara</i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2024= 9 Perkara</i>	90 % (Target Triwulan III 66,66 %)	60.00 %	90,01 %	Dibawah Target

		Target Perkara Diselesaikan Triwulan III TA 2024 = 10 Perkara atau 66.66 % Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2024= 60.00 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan III tahun 2024=38 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan III tahun 2024= 38 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III tahun 2024= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan III tahun 2024= 25 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2024 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III tahun 2024= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan III tahun 2024= 102,34 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan III tahun 2024= 73,32 % Rata-rata Realisasi Triwulan III	97 % Target Triwulan III : 75 %	74,08 %	98,78 %	Dibawah Target

		tahun 2024= 74,08 % % Persentase Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2024= 74,08 %				
--	--	---	--	--	--	--

D. ANALISA, PENGUKURAN KINERJA, STRATEGI, KENDALA, SOLUSI DAN TINDAK LANJUT

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	Capaian Diatas Target. Strategi untuk Mempertahankan Capaian 1. Membuat Court Calender agar sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 3. Pimpinan Berkomitmen untuk Memnitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 4. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang sudah melewati waktu 4 Bulan pada aplikasi E-Kinerja Internal
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	100	0 %	Diatas Target Terdapat 1 Putusan Perkara yang dilakukan secara Restorative Justice, Sehingga capaian jauh melampaui target, sehingga perlu dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja

4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	82,29%	96,81 %	Dibawah Target Perlu dilakukan Revisi Target di dalam Perjanjian Kinerja, disebabkan Perkara Banding meningkat
5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	92,71 %	103,01 %	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian dan mengurangi Upaya Hukum adalah dengan Membuat Putusan secara Professional agar sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku, sehingga mengurangi upaya Pengajuan Hukum baik Banding maupun Kasasi dari Putusan yang sudah ada. Langkah yang dilakukan secara internal adalah:</i> 1. <i>Mensosialisasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung agar Putusan yang dibuat Sesuai Kerangka Template Putusan yang ada</i> 2. <i>Memberikan Keleluasaan Hakim untuk Melanjutkan Studi</i>
6	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0 %	Belum adanya Putusan Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi, maka Langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan MoU dengan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk Pendekatan Perkara Pidana anak untuk penyelesaian Perkara secara Diversi
7	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	3,75	3.89	103,73%	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i>

	transparan dan akuntabel	peradilan				1. Melakukan Monev SKM secara rutin Triwulanan 2. Menindaklanjuti Hasil MONEV SKM
8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E-Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E-Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %	0 %	0 %	Sesuai target Untuk Triwulan I Tahun 2024, belum ada Mediasi yang berhasil dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk membuat mediasi berhasil adalah sebagai berikut:

						1. Secara Psikologi, untuk membuat kenyamanan mediasi harus didukung oleh ruangan Mediasi yang nyaman, Indah dan Nyaman, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah Pengusulan Desain Interior untuk beberapa ruangan Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Khususnya Ruang Mediasi 2. Mendaftarkan Hakim untuk mengikuti Pelatihan sebagai Mediator
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %	100 %	111,11 %	Sesuai target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i> Target Triwulan I adalah 0, Target Triwulan III adalah menyelesaikan aplikasi Terkait Pendaftaran Prodeo dan Sosialisasi Bagi Masyarakat.
12	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 % (Target Triwulan III 66,66 %)	60.00 %	90,01 %	Dibawah Target
13	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini adalah sebagai berikut:</i> 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja POSBAKUM yang ada setiap Bulan 2. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Layanan Posbakum
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %	100 %	105,26%	Capaian Diatas Target. <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian</i> 1. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu

						Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 2. Pimpinan Berkomitmen untuk Memnitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 3. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang yang sudah mencatatn BHT pada aplikasi E-Kinerja Internal dan EIS terkait Penginputan BHT
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97 % Target Triwulan III : 75 %	74,08 %	98,78 %	Dibawah Target (Target Triwulan I 25 %) Kendala ini disebabkan oleh Realisasi DIPA 03 yang hanya 14,34 % hal ini dikarenakan Sidang Keliling hanya sedikit bisa terealisasi. Realisasi ini disebabkan karena perkara yang bisa dilakukan dengan Sidang Keliling hanya perkara yang tidak kompleks contohnya adalah Perkara Penetapan. Salah Satu Perkara Penetapan yang sering diajukan adalah Penggantian atau Perubahan Nama. Hal ini dikarenakan adanya regulasi di Kementerian Dalam Negeri khususnya DUKCAPIL, yang membuat kebijakan bahwa Perubahan Nama diselesaikan secara internal padahal harusnya dalam Perubahan Nama diselesaikan melalui Penetapan Pengadilan

E. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengupayakan agar Pelaksanaan Sidang Keliling yaitu dengan Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memperkenalkan Program

Sidang Keliling dan Perkara Prodeo, serta penggunaan Aplikasi secara online dalam request atau permintaan Pelaksanaan Sidang Keliling dan Prodeo, namun jika tidak terlaksana juga, maka akan dilakukan Revisi Anggaran

2. Merevisi Target pada Perjanjian Kinerja agar sesuai dengan kondisi riil hasil Monitoring dan evaluasi pada beberapa target yang tidak tercapai atau jauh melampaui target yang ada.

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 07 Oktober 2024
Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKI UDDIN

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

Hari / Tanggal	:	Senin, 07 Oktober 2024
Pukul	:	10.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Mohammad Zakiuddin
Notulis	:	Laili Rahmah
Peserta Rapat	:	Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	Hasil Capaian Kinerja						
	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2024= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Targe
	2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat</i>	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Targe

		Waktu Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100.00 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2024= 1 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2024= 100 %	0.1 %	100 %		Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 96 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 79 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III tahun 2024= 82,29%	85 %	82,29%	96,81 %	Dibawah Targe
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 96 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak</i>	90 %	92,71 %	103,01 %	Diatas Target

			melakukan Kasasi = 89 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III tahun 2024= 92,71 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2024= 3.89 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan III tahun 2024= 3.89	3,75	3.89	103,73%	Diatas Target	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 70 Perkara Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 70 Perkara % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target	

		Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2024= 26 Perkara Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 26 Perkara % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2024= 100%				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2024= 5 Perkara Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara Target Mediasi yang berhasil Triwulan III adalah 0.1 Perkara % Persentase Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2024= 0 %	3 %	0 %	0 %	Dibawah Targe
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan III tahun 2024= 2 Perkara Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 2 Perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2024= 100 %	90 %	100 %	111,11 %	Diatas target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan III tahun 2024= 9 Perkara Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2024= 9 Perkara Target Perkara Diselesaikan Triwulan III TA 2024 = 10 Perkara atau 66.66 % Persentase perkara yang	90 % (Target Triwulan III 66,66 %)	60.00 %	90,01 %	Dibawah Targe

		diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2024= 60.00 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan III tahun 2024=38 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan III tahun 2024= 38 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III tahun 2024= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan III tahun 2024= 25 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2024= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2024 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III tahun 2024= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan III tahun 2024= 102,34 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan III tahun 20242022 = 73,32 % Rata-rata Realisasi Triwulan III tahun 2024= 74,08 % % Persentase Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2024= 74,08 %	97 % Target Triwulan III : 75 %	74,08 %	98,78 %	Dibawah Targe

Hasil Analisa dari Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	Capaian Diatas Target. Strategi untuk Mempertahankan Capaian 5. Membuat Court Calender agar sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102.04 %	6. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 7. Pimpinan Berkomitmen untuk Memnitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 8. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang sudah melewati waktu 4 Bulan pada aplikasi E-Kinerja Internal
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	100	1	Diatas Target Terdapat 1 Putusan Perkara yang dilakukan secara Restorative Justice, Sehingga capaian jauh melampaui target, sehingga perlu dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja
4	Terwujudnya proses peradilan yang	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	85 %	82,29%	96,81 %	Dibawah Target

		pasti, transparan dan akuntabel	Hukum Banding				Perlu dilakukan Revisi Target di dalam Perjanjian Kinerja, disebabkan Perkara Banding meningkat
	5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	92,71 %	103,01 %	Diatas Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian dan mengurangi Upaya Hukum adalah dengan Membuat Putusan secara Professional agar sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku, sehingga mengurangi upaya Pengajuan Hukum baik Banding Maupun Kasasi dari Putusan yang sudah ada. Langkah yang dilakukan secara internal adalah:</i> 3. <i>Mensosialisasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung agar Putusan yang dibuat Sesuai Kerangka Template Putusan yang ada</i> 4. <i>Memberikan Keleluasaan Hakim untuk Melanjutkan Studi</i>
	6	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0 %	Belum adanya Putusan Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi, maka Langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 2. <i>Melakukan MoU dengan Aparat Penegak Hukum</i>

						lainnya untuk Pendekatan Perkara Pidana anak untuk penyelesaian Perkara secara Diversi
7	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3.89	103,73 %	Diatas Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : 3. Melakukan Monev SKM secara rutin Triwulanan 4. Menindaklanjuti Hasil MONEV SKM
8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Diatas Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E- Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Diatas Target Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini : Selalu mengecek Jadwal Sidang aplikasi E-Berpadu agar Penandatanganan Putusan secara TTE oleh Panitera selalu tepat waktu agar tidak melewati jadwal Penandatanganan Putusan E- Berpadu, sehingga setelah Penandatanganan Putusan

							ini, Otomatis Salinan Perkara Pidana terkirim secara Otomatis kepada Para Pihak secara tepat Waktu.
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %	0 %	0 %	Sesuai target Untuk Triwulan I Tahun 2024, belum ada Mediasi yang berhasil dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk membuat mediasi berhasil adalah sebagai berikut: 3. Secara Psikologi, untuk membuat kenyamanan mediasi harus didukung oleh ruangan Mediasi yang nyaman, Indah dan Nyaman, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah Pengusulan Desain Interior untuk beberapa ruangan Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Khususnya Ruang Mediasi 4. Mendaftarkan Hakim untuk mengikuti Pelatihan sebagai Mediator	
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %	100 %	111,11 %	Sesuai target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini :</i> Target Triwulan I adalah 0, Target Triwulan III adalah menyelesaikan aplikasi Terkait Pendaftaran Prodeo dan Sosialisasi Bagi Masyarakat.	
12	Meningkatnya Akses Peradilan	b. Persentase perkara yang	90 % (Target	60.00 %	90,01 %	Dibawah Target	

		bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan di luar gedung pengadilan	Triwulan III 66,66 %)			
	13	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target <i>Strategi untuk Mempertahankan Capaian ini adalah sebagai berikut:</i> 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja POSBAKUM yang ada setiap Bulan 4. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Layanan Posbakum
	4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %	100 %	105,26 %	Capaian Diatas Target. Strategi untuk Mempertahankan Capaian 4. Pimpinan Berkomitmen untuk Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Kinerja Minimal 1 Minggu Sekali melalui Aplikasi E-Kinerja Internal 5. Pimpinan Berkomitmen untuk Memnitor Evaluasi Aplikasi MIS tiap hari 6. Pimpinan Berkomitmen untuk Memonitor Perkara yang sudah mencatatn BHT pada aplikasi E-Kinerja Internal dan EIS terkait Penginputan BHT
	5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97 % Target Triwulan III : 75 %	74,08 %	98,78 %	Dibawah Target (Target Triwulan I 25 %) Kendala ini disebabkan oleh Realisasi DIPA 03 yang hanya 14,34 % hal ini dikarenakan Sidang

						Keliling hanya sedikit bisa terealisasi. Realisasi ini disebabkan karena perkara yang bisa dilakukan dengan Sidang Keliling hanya perkara yang tidak kompleks contohnya adalah Perkara Penetapan. Salah Satu Perkara Penetapan yang sering diajukan adalah Penggantian atau Perubahan Nama. Hal ini dikarenakan adanya regulasi di Kementerian Dalam Negeri khususnya DUKCAPIL, yang membuat kebijakan bahwa Perubahan Nama diselesaikan secara internal padahal harusnya dalam Perubahan Nama diselesaikan melalui Penetapan Pengadilan
4	Penutup Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 12.00 WIB.					
PENGESAHAN PIMPINAN RAPAT						

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




MOHAMAD ZAKI UDDIN

NOTULIS



LAILI RAHMAH



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TA 2024



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN.....	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	2

A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan TA 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Desember 2024.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah perkara Pidana putus tahun 2024 = 91 Perkara</i> <i>Jumlah perkara putus tepat waktu tahun 2024 = 91 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu tahun 2024 = 100.00 %	98 %	100 %	Diatas Target
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah perkara perdata putus tahun 2024 = 43 Perkara</i> <i>Jumlah perkara putus tepat waktu tahun 2024 = 43 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu III tahun 2024 = 100.00 %	98 %	100 %	Diatas Target

1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 = 13 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang berhasil menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 = 2 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 = 0 %	50 %	26 %	Dibawah Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus tahun 2024= 43 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus tahun 2024= 91 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tahun 2024= 134 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 112 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024 = 83,58%	85 %	83,58 %	Dibawah Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus tahun 2024= 43 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus tahun 2024= 91 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tahun 2024= 134 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 123 Perkara</i>	90 %	91,79 %	Diatas Target

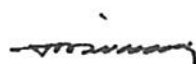
		% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024= 91,79 %			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah perkara pidana anak diversi yang didaftarkan tahun 2024= 0 Perkara</i> <i>Jumlah perkara pidana anak diversi yang diselesaikan tahun 2024= 0 Perkara</i> Persentase perkara pidana anak yang Diselesaikan dengan diversi tahun 2024= 0 Perkara	0.1 %	0	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024= 3.83</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024= 3.83	3,75	3.83	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah perkara pidana putus tahun 2024= 91 Perkara</i> <i>Jumlah salinan yang dikirimkan tepat waktu = 91 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu tahun 2024= 100%	97 %	100 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah perkara perdata putus tahun 2024= 43 Perkara</i> <i>Jumlah salinan yang dikirimkan tepat waktu = 43 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu tahun 2024= 100%	97 %	100 %	Diatas Target

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah perkara mediasi tahun 2024= 6 Perkara</i> <i>Jumlah perkara mediasi berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi tahun 2024= 0 %	3 %	0 %	Dibawah Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo tahun 2024 = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024 = 3 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024= 100 %	90 %	100 %	Diatas target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah register perkara diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun 2024= 12 Perkara</i> <i>Jumlah penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan tahun 2024= 12 Perkara</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2024= 80.00 %	90 %	80.00 %	Dibawah Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM tahun 2024 = 57 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani tahun 2024 = 57 Layanan</i> Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100 %	100 %	Sesuai Target

		hukum (Posbakum) tahun 2024 = 100 %			
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah perkara perdata BHT tahun 2024= 41 Perkara Jumlah permohonan eksekusi tahun 2024= 0 Perkara Jumlah permohonan eksekusi tahun 2024 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2024 = 100 %	95 %	100 %	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) tahun 2024 = 99.68% Realisasi DIPA BADILUM (402026) tahun 2024 = 99.45% % Persentase Realisasi Anggaran tahun 2024 = 99,57 %	97 %	99,57 %	Diatas Target

Pulang Pisau, 31 Desember 2024

Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKI UDDIN



LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUN 2024





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI KE I RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

bangga
melayani
bangsa

**REVISI KE-01 RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516
E-mail: pnpulangpisau@gmail.com**

**REVISI KE-01 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	3.75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98 %

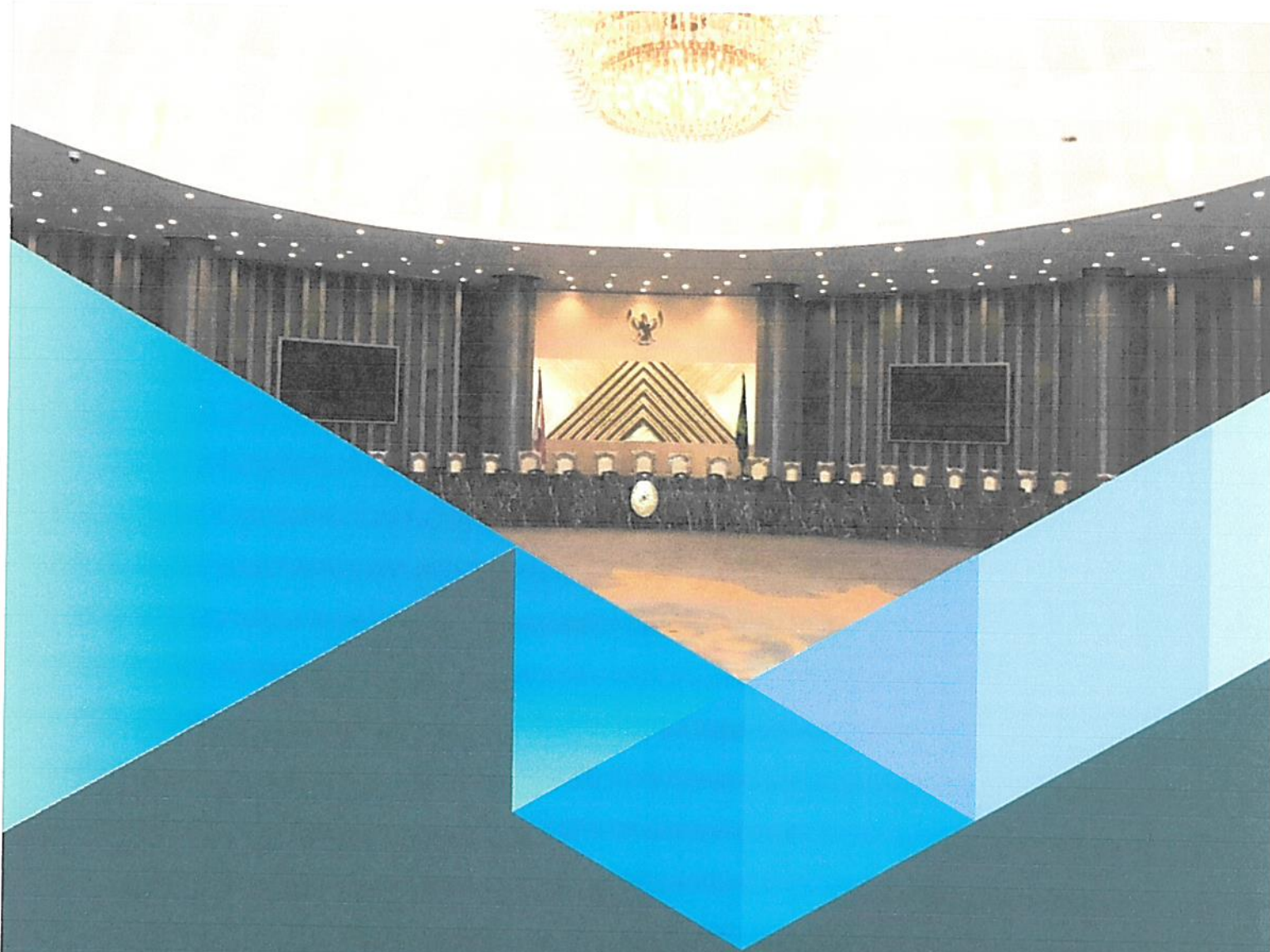
Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 22 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



DIAN NUR PRATIWI



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

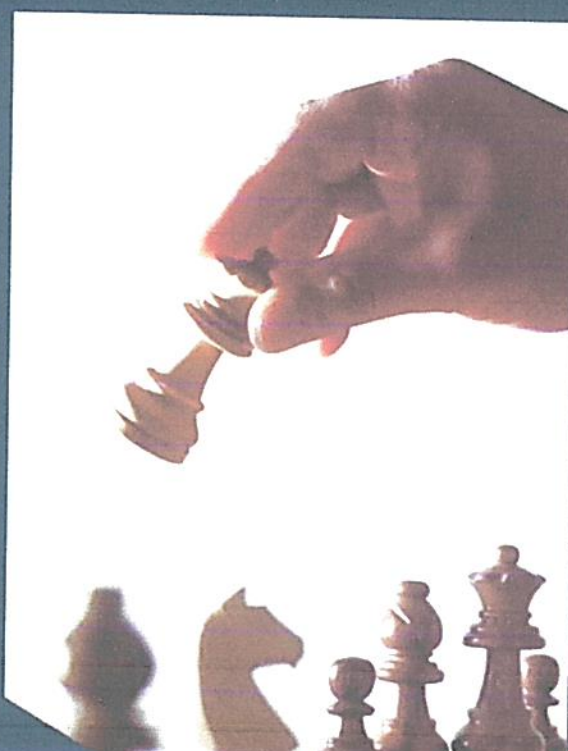
Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



4

LAMPIRAN IV

MATRIK KINERJA DAN
PENDANAAN TAHUN 2020 -
2024 PENGADILAN NEGERI
PULANG PISAU



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Instansi : Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengadilan Negeri Pulang Pisau														
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel													Kepaniteraan
Indikator Kinerja	Persentase perkara pidana diselesaikan waktu		95%	96%	97%	98%	98%							

Sasaran Strategis	Persentase perkara Perdata diselesaikan tepat waktu	95%	96%	97%	98%	98%												
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%												
	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	71 %	72 %	84 %	85%												
	Persentase Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80 %	80 %	82 %	90 %	90 %												
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	2%	0.1%	0.1%	0.1%												
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	80%	93%	3,7	3,7												
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Kepaniteraan																

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	96%	96%	97%	97%	97%												
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	2%	9%	0.1%	3%													
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan																		Kepaniteraan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	90%													
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	90%													
	Persentase pencari keadilan golongan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%													
Sasaran Strategis	Meningkatnya kepatuhan terhadap																		Kepaniteraan

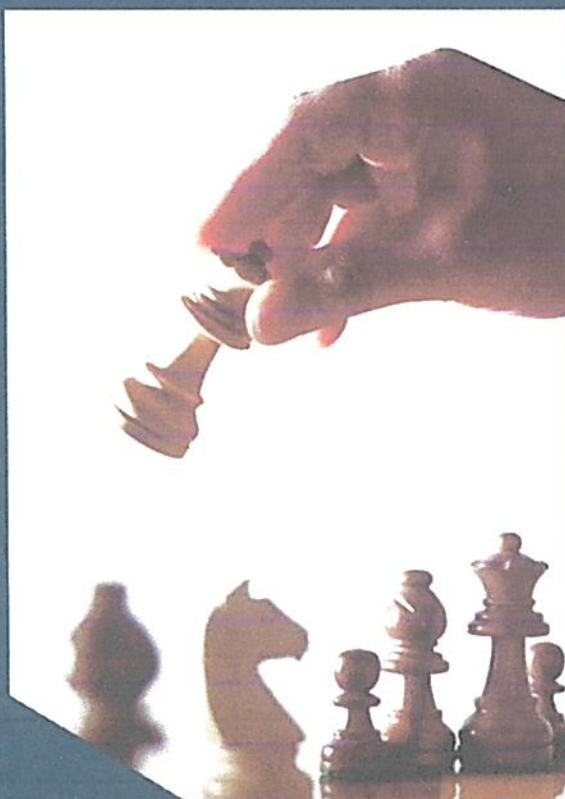
putusan pengadilan												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	90%	90%	90%	95%						
PROGRAM PENEGAKKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAM							68.550	78.945	65,500	93.000	193,591	Kesekretariatan
Sasaran Program	Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum											
Indikator Kinerja Program	Percepatan Penyelesaian Perkara	2	2	2	2	2						
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen						68.550	78.945	65,500	93.000	193,591	Kesekretariatan
Indikator Kinerja Program	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	150	150	150	150	150						
Sasaran kegiatan	Meningkatnya Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau											

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG									6.455.554	23.887.455	3,384,400	4.500.000	1,402,500	Kesekretariatan
Sasaran kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Pulang Pisau													
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						
	Jumlah Layanan Prasarana Internal	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						



LAMPIRAN V

SK TIM PENYUSUN LKJiP, SAKIP DAN EVALUATOR SAKIP





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 79/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan Kinerja baik dari perencanaan, evaluasi maupun pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diperlukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

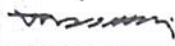
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


/ **MOHAMAD ZAKIUDDIN** #

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Nomor : 79/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

TIM EVALUATOR
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	Mohamad Zakiuddin, S.H. NIP. 198111242006041004
2	Ketua	Noripansyah, S.H. NIP. 197208021993031006
4	Sekretariat	I Made Landep, S.H. NIP. 197210041993031006
5	Anggota	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. NIP. 198910082017122001
		Ishmatul Lu'lu, S.H. NIP. 199312132017122001
		Dede Andreas, S.H., M.H. NIP. 198202122005021003
		Reinhard Simanjuntak, S.H. NIP. 199408202019031005
		Laili Rahmah, A.Md., S.H., M.H. NIP. 198012242009122005
		Riviera Jesica Manurung, S.H. NIP. 199402082020122008
		Arofah Azhar, A.Md. NIP. 198903242020121002

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


/ **MOHAMAD ZAKIUDDIN** #



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 78/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

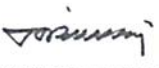
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


/ **MOHAMAD ZAKIUDDIN** 

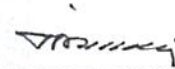
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Nomor : 78/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	Mohamad Zakiuddin, S.H. NIP. 198111242006041004
2	Koordinator Validasi Data	Lelo Herawan, S.H. NIP. 198501142009041003
3	Ketua	Noripansyah, S.H. NIP. 197208021993031006
4	Sekretariat	I Made Landep, S.H. NIP. 197210041993031006
5	Anggota	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. NIP. 198910082017122001
		Ishmatul Lu'lu, S.H. NIP. 199312132017122001
		Dede Andreas, S.H., M.H. NIP. 198202122005021003
		Reinhard Simanjuntak, S.H. NIP. 199408202019031005
		Laili Rahmah, A.Md., S.H., M.H. NIP. 198012242009122005
		Riviera Jesica Manurung, S.H. NIP. 199402082020122008
		Arofah Azhar, A.Md. NIP. 198903242020121002
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.
		2. Ishmatul Lu'lu, S.H.
		3. Noripansyah, S.H.
		4. I Made Landep, S.H.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 16 Desember 2024

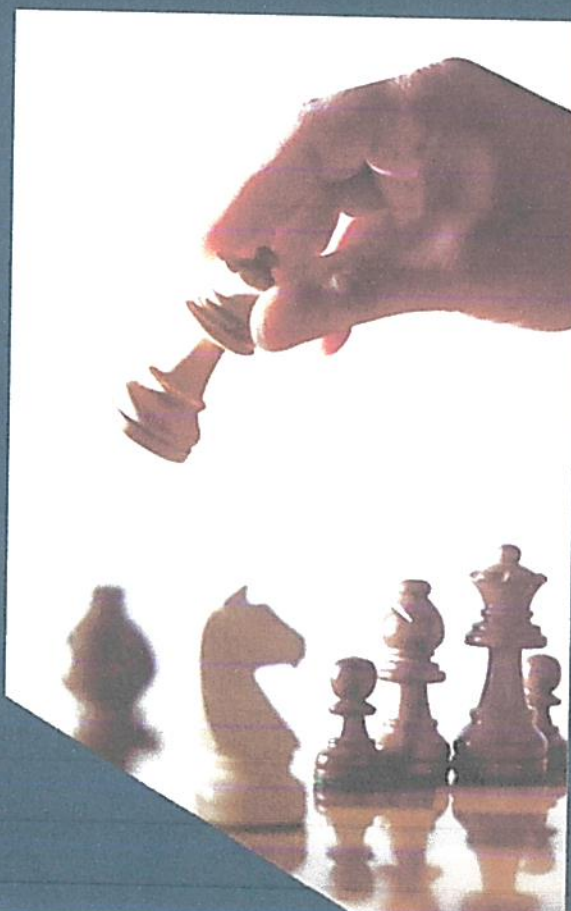
KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


/ **MOHAMAD ZAKIUDDIN** /



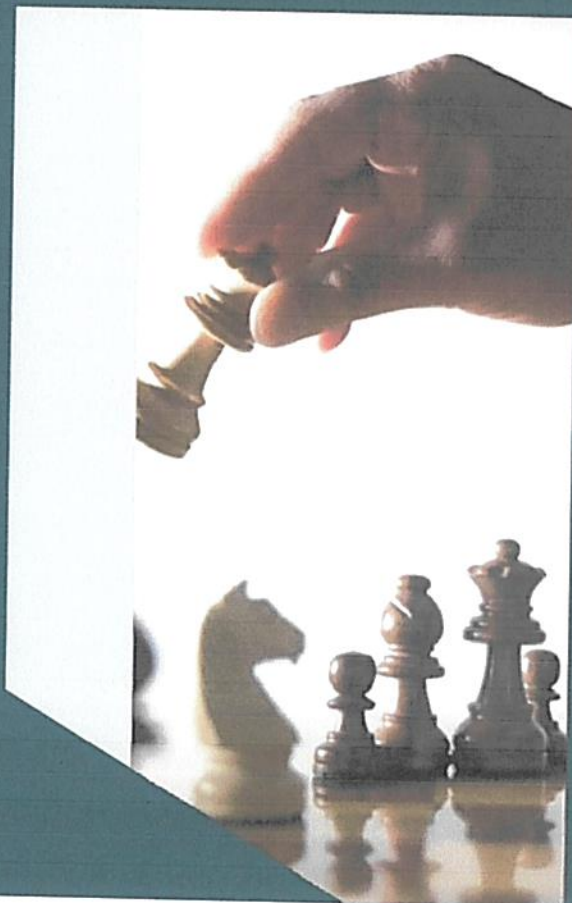
4 LAMPIRAN VI

NOTULEN RAPAT
PENYUSUNAN LKjIP
TAHUN 2024





NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516, Fax (0513) 2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 13 Januari 2025

Nomor : 72.A/KPN.W16-U11/RPT.PTIP/1/2025
Perihal : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Lampiran : -

Kepada Yth : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Di -
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Awal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516, Fax (0513) 2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnputangpisau@gmail.com

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJIP) TAHUN 2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2025

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOHAMAD ZAKI UDDIN	Penanggung Jawab	
2	NORIPANSYAH	Ketua	
3	I MADE LANDEP	Sekretaris	
4	LELO HERAWAN	Koordinator Validasi Data	
5	NIKEN ANGGI PRAJANTI	Anggota	
6	ISHMATUL LU'LU	Anggota	
7	DEDE ANDREAS	Anggota	
8	REINHARD SIMANJUNTAK	Anggota	
9	LAILI RAHMAH	Anggota	
10	RIVIERA J. MANURUNG, S.H.	Anggota	
11	AROFAH AZHAR	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

NOTULEN RAPAT
Penyusunan LKJIP tahun 2024

Hari / Tanggal	:	Senin, 13 Januari 2025
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Zakiuddin, S.H.
Notulis	:	Lessa Wara'a Ezzana
Peserta Rapat	:	Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
RINGKASAN ACARA		
1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau	
	Hasil Rapat 1. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Menyampaikan SK tentang Tim Evaluator SAKIP dan Tim Penyusunan LKJIP tahun 2024 Nomor 78/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan 79/KPN.W16-U11/SK.OT1.6/XII/2024 tentang Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024; 2. Pembahasan tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1884/KPT.W16/RA.1/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewajiban melaporkan Kinerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan; 3. Ketua Tim Evaluator Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau membacakan hasil target capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024; 4. Laporan Kinerja harus sudah dilaporkan paling lambat tanggal 28 Februari 2025; 5. Pengumpulan Dokumen Sumber Keadaan Perkara dikoordinir oleh Kepaniteraan Hukum, sedangkan Dokumen Sumber Kesekretariatan dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan; 6. Dokumen Sumber tersebut di verifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP; 7. Tim Penyusun LkjIP membagi tugas dalam Penyusunan LkjIP dimana Bab I akan di disusun oleh Panitera, Bab II akan Disusun oleh Dede Andreas selaku Panitera Muda Perdata, Bab III tentang Capaian Terkait Keadaan Perkara akan dilaksanakan oleh Lelo Herawan selaku Panitera Muda Hukum, Bab III terkait Realisasi Anggaran akan dilaksanakan oleh Reinhard Simanjuntak selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bab IV akan disusun oleh Laili Rahmah selaku Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Lampiran dan Kompilasi LkjIP akan disusun oleh Arofah Azhar selaku Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;	

8. Seluruh Bab LkjIP paling lambat diserahkan 31 Januari 2025;
9. Kompilasi Laporan LkjIP akan dilaksanakan dari tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan 08 Februari 2025 yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP;
10. Selanjutnya Finalisasi LKJIP akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2025 dan akan dilakukan Penandatanganan LKJIP pada tanggal 12 Februari 2025;
11. Tahap pengiriman LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal yaitu 28 Februari 2025.

Dokumentasi



PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

NOTULIS


LELO HERAWAN





4 LAMPIRAN VII KEADAAN PERKARA TAHUN 2024



Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
2	Pengiriman Berkas	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	Putusan MA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
4	Belum Putus MA	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
5	Penerimaan PN	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	1	2	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	11
2	Pengiriman Berkas	0	1	2	0	0	0	1	3	0	2	1	1	11
3	Putusan MA	0	0	2	0	0	0	2	1	2	1	0	0	8
4	Belum Putus MA	4	6	4	4	4	5	4	5	3	4	6	6	6
5	Penerimaan PN	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	1	10
6	Pemberitahuan Pemohonan/Termohon	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	10

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Banding	1	1	1	3	0	4	1	2	4	2	1	2	22
2	Pengiriman Berkas	3	0	2	3	0	4	0	3	2	2	2	2	23
3	Putusan PT	2	1	1	1	3	0	4	1	2	4	1	1	21
4	Belum Putus PT	2	2	2	4	1	5	2	3	5	3	3	4	4
5	Penerimaan PN	0	2	2	1	3	0	4	0	3	2	2	2	21
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	1	2	1	1	4	0	2	2	3	2	2	2	22

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Januari - Desember 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	11	8	19	12	0	12	12	0	7	47	34
2	Februari	7	12	19	11	0	11	11	0	8	51	30
3	Maret	8	25	33	14	0	14	14	0	19	72	50
4	April	19	4	23	7	0	7	7	0	16	46	31
5	Mei	16	6	22	11	0	11	11	0	11	41	33
6	Juni	11	12	23	13	0	13	13	0	10	62	38
7	Juli	10	12	22	10	0	10	8	2	14	63	37
8	Agustus	14	30	44	31	0	33	33	0	11	127	60
9	September	11	18	29	17	0	17	17	0	12	74	45
10	Oktober	12	32	44	30	0	30	30	0	14	115	59
11	November	14	118	132	122	0	122	122	0	10	380	146
12	Desember	10	63	73	61	0	61	61	0	12	205	83
Total			340		339			339			1283	646

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari - Desember 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU				MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Januari	2	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	
2	Februari	1	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
3	Maret	3	0	0	2	5	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	2	
4	April	2	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	
5	Mei	1	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	
6	Juni	2	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	
7	Juli	2	0	0	6	8	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	
8	Agustus	5	0	0	5	10	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	7	
9	September	7	0	0	2	9	4	0	0	1	0	0	4	0	4	0	5	
10	Oktober	5	0	0	4	9	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	8	
11	November	7	1	0	6	14	5	0	0	1	0	1	6	0	5	1	8	
12	Desember	8	1	0	2	11	7	1	0	0	0	0	8	0	7	1	4	
TOTAL						36	35			0	6	0	1			34		

Tahun 2024

[illegible]

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohonan/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM EKSEKUSI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2024

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4

LAMPIRAN VIII

TINDAK LANJUT ATAS LHE PT PALANGKARAYA TAHUN 2023





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI

TERHADAP LHE KINERJA
2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayan
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL LHE <i>PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA</i>	2
D.	HASIL MONEV TERHADAP LHE	6
A.	PENUTUP	8
	DOKUMENTASI.....	10

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1093/KPT.W16/RA.1/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 dengan Nilai 72,80 dengan Nilai (BB).

Dari Hasil Penilaian tersebut perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi tentang tindak Lanjut Pencapaian Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut, agar bisa memberikan gambaran langkah kedepan dalam hal perbaikan Kinerja di tahun 2024.

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LHE LkjIP dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2025 di Ruangan Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Adapun Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

C. HASIL LHE *PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA*

Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	- Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT. - Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024. - Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang	30,00 %	19,20 %

		ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitera dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).		
2	Pengukuran Kinerja	• Data Kinerja yang dikumpulkan sebagai data input pada aplikasi Komdanas, e-monev Bappenas dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seharusnya menyajikan data yang sama dan relevan dalam mendukung capaian kinerja yang diharapkan. • Monitoring dan evaluasi (monev) pengukuran capaian kinerja secara triwulanan belum memuat rekomendasi atau perbaikan untuk capaian kedepannya. • Belum terdapat rapat revisi anggaran yang membahas mengenai keadaan anggaran maupun rencana pergeseran atau penyesuaian anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Rapat berjenjang mulai dari rapat kepaniteraan, rapat kesekretariatan sampai rapat bulanan belum terdapat memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.	30,00 %	24,00%
3	Pelaporan Kinerja	• Pada Bab III dokumen LkjIP belum memuat sepenuhnya analisa tentang upaya 1. dan hambatan pencapaian indikator, mengenai keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator. • Pada Bab III dokumen LKjIP Tahun 2022 belum dilengkapi analisa efisiensi atas	15,00 %	11,10%

		penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	- Beberapa anggota Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja. - Hasil rekomendasi terhadap pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya.	25,00 %	18,50 %
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			100,00 %	72,80 %

Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar SK Tim Reviu Ke-3 Renstra dapat ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
2. Agar Matriks Indikator Kinerja Utama pada Bab II Reviu Ke-3 Renstra hanya memuat Indikator dalam IKU;
3. Agar ditambahkan target tahun 2024 untuk indikator "Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan presentase realisasi anggaran pada Matriks Bab IV Reviu ke-3 Renstra;
4. Agar target indikator presentase realisasi anggaran pada Revisi ke-2 RKT 2023 dan Revisi ke-1 PKT 2023 dapat selaras dengan reviu ke-3 Renstra PN Pulang Pisau;
5. Agar Rencana Aksi Monev Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan membuat realisasi pertriwulan mulai dari atasan sampai pelaksana di bawahnya;

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar selanjutnya melampirkan eviden tindak lanjut hasil monev berupa reviu/revisi dokumen perencanaan sebagai bukti bahwa hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas;

2. Agar selanjutnya menambahkan analisa efisiensi dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja di dalam laporan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakna melalui Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara berkala;

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar LkjIP disusun sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan SK KMA Nomor 2049 Tahun 2022;
2. Agar analisa perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan terpisah dengan analisa perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya;
3. Agar Bab III LkjIP membuat perbandingan capaian kinerja dengan Tahun Renstra pada setiap indikator;
4. Agar Bab III LkjIP membuat Analisa Sumber Daya dari sisi Anggaran pada setiap indikator dengan membandingkan realisasi anggaran dengan capaian kinerja;
5. Agar analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi secara keseluruhan dituangkan pada setiap indikator dalam Monev PKT;
6. Agar melampirkan/melaksanakan Rapat Evaluasi Anggaran yang membahas penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
7. Agar LHE AKIP digunakan dalam perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar format Matriks TLHE dapat disesuaikan dengan standar sebagaimana diatur dalam surat SEKMA Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
2. Agar dalam rapat berjenjang lebih tajam membahas tentang capaian kinerja yang ada di dokumen PKT PN Pulang Pisau;
3. Agar tindak lanjut LHE AKIP dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai;
4. Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja memuat analisa efisiensi kinerja yang membandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran pada masing-masing indikator sehingga dapat dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja internal;

D. HASIL MONEV TERHADAP LHE

<i>Sub Komponen</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tindak Lanjut</i>
<i>Perencanaan Kinerja</i>	<i>Agar SK Tim Reviu Ke-3 Renstra dapat ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;</i>	<i>Membubuhkan tanda tangan pada SK Tim Reviu Ke-3 Renstra</i>
	<i>Agar Matriks Indikator Kinerja Utama pada Bab II Reviu Ke-3 Renstra hanya memuat Indikator dalam IKU;</i>	<i>Melakukan revisi Matriks Indikator Kinerja Utama pada Bab II Reviu Ke-3 Renstra</i>
	<i>Agar ditambahkan target tahun 2024 untuk indikator "Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan presentase realisasi anggaran pada Matriks Bab IV Reviu ke-3 Renstra;</i>	<i>Memperbaiki dan menambahkan target tahun 2024 untuk indikator "Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan presentase realisasi anggaran pada Matriks Bab IV Reviu ke-3 Renstra;</i>
	<i>Agar target indikator presentase realisasi anggaran pada Revisi ke-2 RKT 2023 dan Revisi ke-1 PKT 2023 dapat selaras dengan reviu ke-3 Renstra PN Pulang Pisau;</i>	<i>Melakukan perbaikan pada target indikator presentase realisasi anggaran pada Revisi ke-2 RKT 2023 dan Revisi ke-1 PKT 2023 dapat selaras dengan reviu ke-3 Renstra PN Pulang Pisau;</i>

	Agar Rencana Aksi Monev Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan membuat realisasi pertriwulan mulai dari atasan sampai pelaksana di bawahnya;	Membuat Rencana Aksi Monev Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang membuat realisasi pertriwulan;
Pengukuran Kinerja	Agar selanjutnya melampirkan eviden tindak lanjut hasil monev berupa reviu/revisi dokumen perencanaan sebagai bukti bahwa hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas;	Tindak Lanjut Monev akan dilaksanakan tahun 2024
	Agar selanjutnya menambahkan analisa efisiensi dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja di dalam laporan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakna melalui Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara berkala;	Tindak Lanjut Monev akan dilaksanakan tahun 2024
Pelaporan Kinerja	Agar LkjIP disusun sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan SK KMA Nomor 2049 Tahun 2022;	Dokumen LKJiP 2024 akan disusun sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan SK KMA Nomor 2049 Tahun 2022;
	Agar analisa perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan terpisah dengan analisa perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya;	Dokumen LKJiP 2024 akan di analisis secara tajam dengan menginformasikan analisa perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan terpisah dengan analisa perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya;
	Agar Bab III LkjIP membuat perbandingan capaian kinerja dengan Tahun Renstra pada setiap indikator;	Bab III LkjIP 2024 akan dianalisis secara tajam yang memuat perbandingan capaian kinerja dengan Tahun Renstra pada setiap indikator;
	Agar Bab III LkjIP membuat Analisa Sumber Daya dari sisi Anggaran pada setiap indikator dengan membandingkan realisasi anggaran dengan capaian kinerja;	Bab III LkjIP 2024 akan dianalisis secara tajam yang memuat Analisa Sumber Daya dari sisi Anggaran pada setiap indikator dengan membandingkan realisasi anggaran dengan capaian kinerja;

	Agar analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi secara keseluruhan dituangkan pada setiap indikator dalam Monev PKT;	Akan dilakukan analisa yang lebih tajam terkait penyebab keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi secara keseluruhan dituangkan pada setiap indikator dalam Monev PKT.
	Agar melampirkan/melaksanakan Rapat Evaluasi Anggaran yang membahas penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;	Akan dilaksanakan Rapat Evaluasi Anggaran yang membahas penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
	Agar LHE AKIP digunakan dalam perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;	LHE AKIP akan digunakan dalam perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Agar format Matriks TLHE dapat disesuaikan dengan standar sebagaimana diatur dalam surat SEKMA Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;	Format Matriks TLHE akan disesuaikan dengan standar sebagaimana diatur dalam surat SEKMA Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
	Agar dalam rapat berjenjang lebih tajam membahas tentang capaian kinerja yang ada di dokumen PKT PN Pulang Pisau;	Rapat berjenjang akan lebih tajam membahas tentang capaian kinerja yang ada di dokumen PKT PN Pulang Pisau;
	Agar tindak lanjut LHE AKIP dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai;	Tindak lanjut LHE AKIP akan dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melibatkan pimpinan
	Agar dalam penysunan Laporan Kinerja memuat analisa efisiensi kinerja yang membandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran pada masing-masing indikator sehingga dapat dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja internal;	Penysunan Laporan Kinerja akan dianalisa lebih tajam dan memuat analisa efisiensi kinerja yang membandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran pada masing-masing indikator sehingga dapat dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja internal;

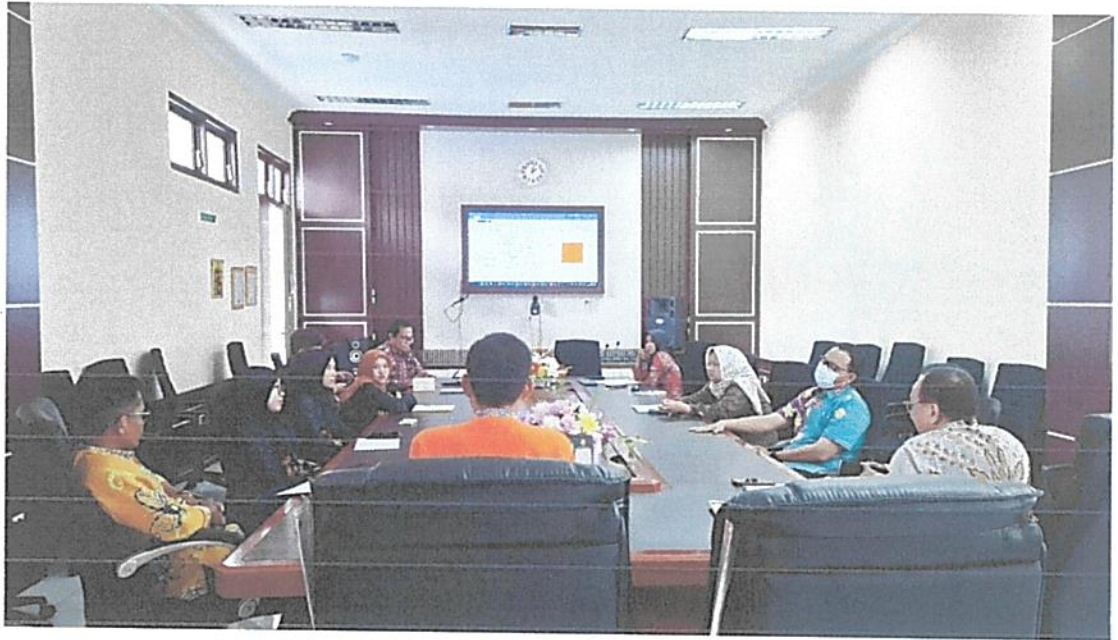
E. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pulang Pisau, 5 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau


Mohamad Zakiuddin

DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI LKJIP**

Hari / Tanggal	:	Kamis / 5 Desember 2025
P u k u l	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LkjIP Tahun 2024
Pimpinan Rapat	:	Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Seluruh Pegawai PN Pulang Pisau

RINGKASAN ACARA

1. Pembukaan
Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
2. Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	- Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT. - Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024. - Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitera dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain	30,00 %	19,20 %

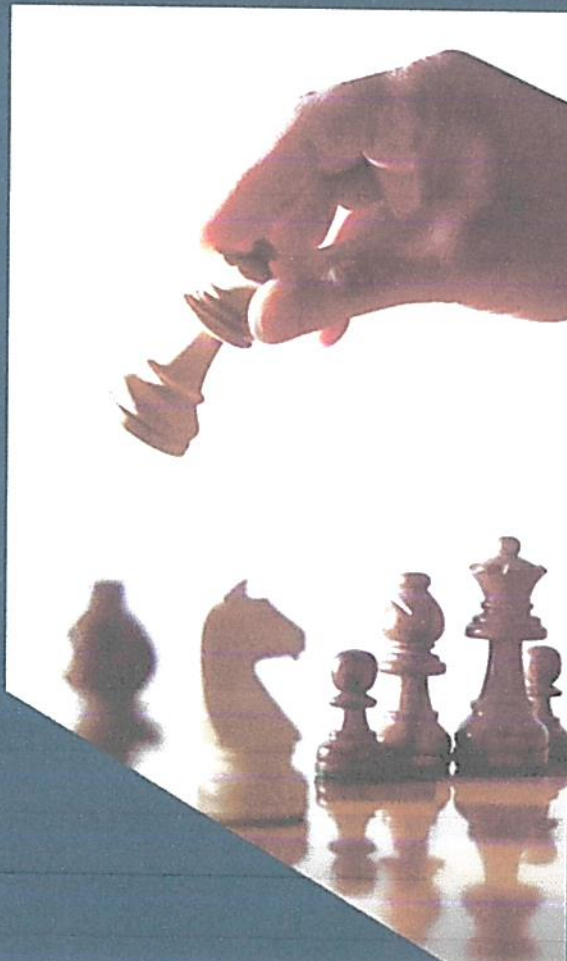
			yang saling berkaitan (crosscutting).		
	2	Pengukuran Kinerja	• Data Kinerja yang dikumpulkan sebagai data input pada aplikasi Komdanas, e-monev Bappenas dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seharusnya menyajikan data yang sama dan relevan dalam mendukung capaian kinerja yang diharapkan. • Monitoring dan evaluasi (monev) pengukuran capaian kinerja secara triwulanan belum memuat rekomendasi atau perbaikan untuk capaian kedepannya. • Belum terdapat rapat revisi anggaran yang membahas mengenai keadaan anggaran maupun rencana pergeseran atau penyesuaian anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Rapat berjenjang mulai dari rapat kepaniteraan, rapat kesekretariatan sampai rapat bulanan belum terdapat memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.	30,00 %	24,00 %
	3	Pelaporan Kinerja	• Pada Bab III dokumen LkjIP belum memuat sepenuhnya analisa tentang upaya 1. dan hambatan pencapaian indikator, mengenai keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator. • Pada Bab III dokumen LKjIP Tahun 2022 belum dilengkapi analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.	15,00 %	11,10%
	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	• Beberapa anggota Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja.	25,00 %	18,50 %

		Hasil rekomendasi terhadap pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya.			
		NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00 %	72,80 %	
3.	Dokumentasi				
4	Penutup Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LkjIP Tahun 2023 ditutup pada Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.	Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau  Mohamad Zakiuddin Notulis  Lessa Wara'a Ezzana			



LAMPIRAN IX

REALISASI ANGGARAN



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 4,085,467,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 6986 6986.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,085,467,000 4,085,467,000 4,085,467,000	
6986.EBA.994 001 A 511111	Lokasi : KAB. PULANG PISAU Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) - Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 Layanan 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN	 872,128,000 72,281,000 71,894,000 11,028,000	 872,128,000 72,281,000 71,894,000 11,028,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	 13,000 2,000 2,000	 17,000 13,000 2,000 2,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	 44,811,000 3,564,000 3,525,000	 44,811,000 3,564,000 3,525,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	 14,867,000 1,232,000 1,217,000	 14,867,000 1,232,000 1,217,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	 24,120,000 2,010,000 2,010,000	 24,120,000 2,010,000 2,010,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.043-Palangkaraya) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	 1.0 THN 1.0 BLN	 1,226,590,000 89,810,000	 1,226,590,000 89,810,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 4,085,467,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			157,365,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	103,583,000	103,583,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	26,914,000	26,914,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	26,868,000	26,868,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			49,319,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	49,319,000	49,319,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			179,033,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	179,033,000	179,033,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			10,730,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	9,280,000	9,280,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	725,000	725,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	725,000	725,000	
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			129,600,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [8 ORG x 12 BLN]	96.0 OB	1,350,000	129,600,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,118,316,000	
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			420,257,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			399,354,000	RM
	- Pramubakti [5 Orang x 12 Bulan]	60.0 OB	3,194,000	191,640,000	
	- THR Pramubakti [5 Orang x 1 Bulan]	5.0 OB	3,194,000	15,970,000	
	- Satpam [2 Orang x 12 Bulan]	24.0 OB	3,513,000	84,312,000	
	- THR Satpam [2 Orang x 1 Bulan]	2.0 OB	3,513,000	7,026,000	
	- Pengemudi [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	3,513,000	42,156,000	
	- THR Pengemudi [1 Orang x 1 Bulan]	1.0 OB	3,513,000	3,513,000	
	- Belanja Konsumsi PTSP dan Air Minum Pegawai [12 BLN]	12.0 BULAN	1,250,000	15,000,000	
	- Keperluan Sehari-hari Habis Pakai	1.0 TAHUN	39,737,000	39,737,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			20,903,000	RM
	- Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.0 Tahun	1,914,000	1,914,000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai	1.0 Tahun	18,989,000	18,989,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			210,084,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 4,085,467,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			200,393,000	RM
	- Langganan Internet	1.0 Tahun	198,000,000	198,000,000	
	- Langganan Lisensi Video Conference	1.0 Tahun	2,393,000	2,393,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			2,658,000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.0 Tahun	2,658,000	2,658,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			7,033,000	RM
	- Langganan VPS Server, SSL dan Domain	1.0 Tahun	7,033,000	7,033,000	
C	PEMELIHARAAN KANTOR			248,419,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			156,706,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung dan Halaman	2956.0 M2	53,013	156,706,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			91,713,000	RM
	- Kendaraan Dinas Roda 4	2.0 Unit	27,000,000	54,000,000	
	- Kendaraan Dinas Roda 4 (pinjam pakai)	1.0 Unit	26,758,000	26,758,000	
	- Kendaraan Dinas Roda 2	2.0 Unit	2,860,000	5,720,000	
	- Laptop	5.0 Unit	35,600	178,000	
	- Printer	10.0 Unit	1,100	11,000	
	- AC Split	6.0 Unit	1,000	6,000	
	- P.C. Unit	18.0 Unit	280,000	5,040,000	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			87,096,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			30,576,000	RM
	- Pakaian Dinas PNS [14 ORANG x 2 STEEL]	28.0 STEL	700,000	19,600,000	
	- Seragam PPNP [6 ORANG x 2 STEEL]	12.0 STEL	686,000	8,232,000	
	- Seragam Satpam [2 ORANG x 2 STEEL]	4.0 STEL	686,000	2,744,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.043-Palangkaraya)			56,520,000	RM
	- Kuasa Pengguna Anggaran [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	1,368,000	16,416,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	1,326,000	15,912,000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	462,000	5,544,000	
	- PPSPM [12 BLN x 1 ORG]	12.0 OB	528,000	6,336,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 Orang x 12 Bulan]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	- PPABP	12.0 OB	342,000	4,104,000	
H	KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA			50,520,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 4,085,467,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I 524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			50,520,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Uang Harian [1 Orang x 2 Hari x 44 Keg]	88.0 OH	360,000	31,680,000	
	- Penginapan [3 Orang x 1 Hari x 10 Keg]	30.0 OH	402,000	12,060,000	
	- Tiket dan Transportasi [3 Orang x 1 PP x 10 Keg]	30.0 OK	226,000	6,780,000	
	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL			18,420,000	
J 524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			18,420,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Biaya Transportasi [2 Orang x 1 PP x 12 Keg]	24.0 OK	132,000	3,168,000	
	- Uang Harian [1 Orang x 1 Hari x 26 Keg]	26.0 OH	360,000	9,360,000	
	- Penginapan [1 Orang x 1 Hari x 12 Keg]	12.0 OK	491,000	5,892,000	
	HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC			83,520,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			83,520,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [8 ORG x 12 BLN]	96.0 OB	870,000	83,520,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pulang Pisau, 31 Desember 2024

I MADE LANDEP, S.H.
NIP 197210041993031006

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401920 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 1 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%
Jumlah Seluruhnya		4,085,467,000	0	3,993,273,792	78,926,989	4,072,200,781	99.68 %
WA Program Dukungan Manajemen		4,085,467,000	0	3,993,273,792	78,926,989	4,072,200,781	99.68 %
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		4,085,467,000	0	3,993,273,792	78,926,989	4,072,200,781	99.68 %
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,085,467,000	0	3,993,273,792	78,926,989	4,072,200,781	99.68 %
EBA.994 Layanan Perkantoran		4,085,467,000	0	3,993,273,792	78,926,989	4,072,200,781	99.68 %
001 Gaji dan Tunjangan		2,967,151,000	0	2,926,565,019	27,760,000	2,954,325,019	99.57 %
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan		2,967,151,000	0	2,926,565,019	27,760,000	2,954,325,019	99.57 %
511111 Belanja Gaji Pokok PNS		1,027,331,000	0	1,022,614,200	0	1,022,614,200	99.54 %
000001. Belanja Gaji Pokok PNS		872,128,000	0	867,412,800	0	867,412,800	99.46 %
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)		72,281,000	0	72,280,700	0	72,280,700	100.00
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)		71,894,000	0	71,893,300	0	71,893,300	100.00
000004. Tambahan Kenaikan Gaji		11,028,000	0	11,027,400	0	11,027,400	99.99 %
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS		17,000	0	13,605	0	13,605	80.03 %
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS		13,000	0	10,865	0	10,865	83.58 %
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)		2,000	0	1,402	0	1,402	70.10 %
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)		2,000	0	1,338	0	1,338	66.90 %
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		51,900,000	0	51,897,830	0	51,897,830	100.00
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		44,811,000	0	44,810,090	0	44,810,090	100.00
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)		3,564,000	0	3,563,240	0	3,563,240	99.98 %
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)		3,525,000	0	3,524,500	0	3,524,500	99.99 %
511122 Belanja Tunj. Anak PNS		17,316,000	0	17,314,910	0	17,314,910	99.99 %
000011. Belanja Tunj. Anak PNS		14,867,000	0	14,866,610	0	14,866,610	100.00
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)		1,232,000	0	1,231,898	0	1,231,898	99.99 %
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)		1,217,000	0	1,216,402	0	1,216,402	99.95 %
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS		28,140,000	0	28,140,000	0	28,140,000	100.00
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS		24,120,000	0	24,120,000	0	24,120,000	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401920 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 2 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
						%	
511124	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00
	000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,316,400,000	0	1,316,400,000	0	1,316,400,000	100.00
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,226,590,000	0	1,226,590,000	0	1,226,590,000	100.00
511125	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	89,810,000	0	89,810,000	0	89,810,000	100.00
	Belanja Tunj. PPh PNS	157,365,000	0	157,363,454	0	157,363,454	100.00
	000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	103,583,000	0	103,582,454	0	103,582,454	100.00
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	26,914,000	0	26,913,771	0	26,913,771	100.00
511126	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	26,868,000	0	26,867,229	0	26,867,229	100.00
	Belanja Tunj. Beras PNS	49,319,000	0	49,318,020	0	49,318,020	100.00
	000022. Belanja Tunj Beras PNS	49,319,000	0	49,318,020	0	49,318,020	100.00
	Belanja Uang Makan PNS	179,033,000	0	151,273,000	27,760,000	179,033,000	100.00
511129	000023. Belanja Uang Makan PNS	179,033,000	0	151,273,000	27,760,000	179,033,000	100.00
	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,730,000	0	10,730,000	0	10,730,000	100.00
	000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	9,280,000	0	9,280,000	0	9,280,000	100.00
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	725,000	0	725,000	0	725,000	100.00
511157	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	725,000	0	725,000	0	725,000	100.00
	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	129,600,000	0	121,500,000	0	121,500,000	93.75 %
	000063. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	129,600,000	0	121,500,000	0	121,500,000	93.75 %
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,118,316,000	0	1,066,708,773	51,166,989	1,117,875,762	99.96 %
002.0A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	420,257,000	0	393,134,752	27,121,000	420,255,752	100.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	399,354,000	0	372,232,152	27,121,000	399,353,152	100.00
	000027. Pramubakti	191,640,000	0	175,670,000	15,970,000	191,640,000	100.00
	000028. THR Pramubakti	15,970,000	0	15,970,000	0	15,970,000	100.00
	000029. Satpam	84,312,000	0	77,286,000	7,026,000	84,312,000	100.00
000030.	THR Satpam	7,026,000	0	7,026,000	0	7,026,000	100.00
	000031. Pengemudi	42,156,000	0	38,643,000	3,513,000	42,156,000	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401920 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 3 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
						%	
521811	000032. THR Pengemudi	3,513,000	0	3,513,000	0	3,513,000	100.00
	000065. Belanja Konsumsi PTSP dan Air Minum Pegawai	15,000,000	0	14,387,600	612,000	14,999,600	100.00
	000066. Keperluan Sehari-hari Habis Pakai	39,737,000	0	39,736,552	0	39,736,552	100.00
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,903,000	0	20,902,600	0	20,902,600	100.00
002.0B	000033. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1,914,000	0	1,913,600	0	1,913,600	99.98 %
	000034. keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai	18,989,000	0	18,989,000	0	18,989,000	100.00
	002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	210,084,000	0	191,001,588	19,081,989	210,083,577	100.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	200,393,000	0	182,160,930	18,231,989	200,392,919	100.00
	000035. Langganan Internet	198,000,000	0	179,999,990	17,999,999	197,999,989	100.00
521114	000036. Langganan Lisensi Video Conference	2,393,000	0	2,160,940	231,990	2,392,930	100.00
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,658,000	0	1,808,000	850,000	2,658,000	100.00
	000037. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,658,000	0	1,808,000	850,000	2,658,000	100.00
522141	Belanja Sewa	7,033,000	0	7,032,658	0	7,032,658	100.00
	000039. Langganan VPS Server, SSL dan Domain	7,033,000	0	7,032,658	0	7,032,658	100.00
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	248,419,000	0	245,222,840	3,164,000	248,386,840	99.99 %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156,706,000	0	156,703,649	0	156,703,649	100.00
	000040. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	156,706,000	0	156,703,649	0	156,703,649	100.00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91,713,000	0	88,519,191	3,164,000	91,683,191	99.97 %
	000041. Kendaraan Dinas Roda 4	54,000,000	0	52,453,700	1,546,000	53,999,700	100.00
	000043. Kendaraan Dinas Roda 4 (pinjam pakai)	26,758,000	0	25,140,000	1,618,000	26,758,000	100.00
	000044. Kendaraan Dinas Roda 2	5,720,000	0	5,716,000	0	5,716,000	99.93 %
000045.	Laptop	178,000	0	178,000	0	178,000	100.00
	000046. Printer	11,000	0	0	0	0	0.00 %
	000047. AC Split	6,000	0	0	0	0	0.00 %
	000048. P.C. Unit	5,040,000	0	5,031,491	0	5,031,491	99.83 %
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	87,096,000	0	87,096,000	0	87,096,000	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401920 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 4 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
						%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30,576,000	0	30,576,000	0	30,576,000	100.00
	000049. Pakaian Dinas PNS	19,600,000	0	19,600,000	0	19,600,000	100.00
	000050. Seragam PPNP	8,232,000	0	8,232,000	0	8,232,000	100.00
	000068. Seragam Satpam	2,744,000	0	2,744,000	0	2,744,000	100.00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,520,000	0	56,520,000	0	56,520,000	100.00
	000051. Kuasa Pengguna Anggaran	16,416,000	0	16,416,000	0	16,416,000	100.00
	000052. Pejabat Pembuat Komitmen	15,912,000	0	15,912,000	0	15,912,000	100.00
	000053. Bendahara Pengeluaran	5,544,000	0	5,544,000	0	5,544,000	100.00
	000054. Staf Pengelola Keuangan	8,208,000	0	8,208,000	0	8,208,000	100.00
	000055. PPABP	4,104,000	0	4,104,000	0	4,104,000	100.00
	000064. PPSPM	6,336,000	0	6,336,000	0	6,336,000	100.00
002.0H	KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA	50,520,000	0	49,585,000	720,000	50,305,000	99.57 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,520,000	0	49,585,000	720,000	50,305,000	99.57 %
	000056. Uang Harian	31,680,000	0	30,800,000	720,000	31,520,000	99.49 %
	000057. Penginapan	12,060,000	0	12,011,000	0	12,011,000	99.59 %
	000058. Tiket dan Transportasi	6,780,000	0	6,774,000	0	6,774,000	99.91 %
002.0I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	18,420,000	0	17,263,520	1,080,000	18,343,520	99.58 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,420,000	0	17,263,520	1,080,000	18,343,520	99.58 %
	000059. Biaya Transportasi	3,168,000	0	3,100,000	0	3,100,000	97.85 %
	000060. Uang Harian	9,360,000	0	8,280,000	1,080,000	9,360,000	100.00
	000061. Penginapan	5,892,000	0	5,883,520	0	5,883,520	99.86 %
002.0J	HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC	83,520,000	0	83,405,073	0	83,405,073	99.86 %
522141	Belanja Sewa	83,520,000	0	83,405,073	0	83,405,073	99.86 %
	000062. Bantuan Sewa Rumah Dinas	83,520,000	0	83,405,073	0	83,405,073	99.86 %

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 193,591,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			193,591,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			193,591,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan		1,500,000	
	Lokasi : KAB. PULANG PISAU				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	2.0 kegiatan		1,500,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			1,500,000	U
C	Kimwasmat			1,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1,500,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Uang Harian [3 ORG x 1 HARI x 2 KEG]	6.0 OH	240,000	1,440,000	
	- Tiket dan Transportasi [3 ORG x 1 Hari x 2 KEG]	6.0 OH	10,000	60,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	74.0 Perkara, Berkas Perkara		57,500,000	
	Lokasi : KAB. PULANG PISAU				
1049.BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	74.0 Perkara		57,500,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			25,413,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			25,413,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			25,413,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Alat Tulis Kantor	74.0 PKR	343,419	25,413,000	
052	Penetapan Hari Sidang			300,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	6.0 OK	50,000	300,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			1,143,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,143,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			543,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.0 Dok	27,150	543,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	12.0 OK	50,000	600,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			15,824,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,824,000	
521211	Belanja Bahan			15,824,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Konsumsi makan terdakwa dan Penjaga Tahanan	736.0 OK	21,500	15,824,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			1,775,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 193,591,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,775,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.043-Palangkaraya)			275,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	12.0 OK	22,917	275,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.043-Palangkaraya)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	30.0 OK	50,000	1,500,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			2,970,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,970,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.043-Palangkaraya)			2,970,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	99.0 BRKS	30,000	2,970,000	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,849,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,849,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.043-Palangkaraya)			2,649,000	RM
	- Pengiriman salinan putusan	26.0 Dok	101,885	2,649,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.043-Palangkaraya)			3,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/terdakwa	52.0 OK	50,000	2,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	12.0 OK	50,000	600,000	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			4,226,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,226,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.043-Palangkaraya)			1,926,000	RM
	- Pengiriman berkas kasasi dan PK	10.0 Dok	192,600	1,926,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.043-Palangkaraya)			2,300,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	16.0 OK	50,000	800,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/terdakwa/penasehat hukum	30.0 OK	50,000	1,500,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	52.0 Orang		28,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. PULANG PISAU				
051	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	52.0 Orang		28,000,000	
A	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
522131	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.043-Palangkaraya)			28,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
ALOKASI Rp. 193,591,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	17.0 Perkara, Berkas Perkara		106,591,000	
1049.QCA.001	Lokasi : KAB. PULANG PISAU				
051	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.0 Perkara		1,340,000	
A	Biaya Perkara			1,340,000	U
521111	PEMBEBASAN BIAYA PERKARA			1,340,000	
	Belanja Keperluan Perkantoran			1,340,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Keperluan Sehari-hari Habis Pakai	2.0 KEG	670,000	1,340,000	
1049.QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	15.0 Perkara		105,251,000	
051	Sidang Diluar Gedung Pengadilan			105,251,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			105,251,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			23,700,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Spanduk, Brosur dan Belanja Habis Pakai Keperluan Sidang Keliling	1.0 Tahun	23,700,000	23,700,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			19,951,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- ATK Sidang Keliling	1.0 Tahun	19,951,000	19,951,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			61,600,000	RM
	(KPPN.043-Palangkaraya)				
	- Uang Harian [4 Orang x 2 Hari x 9 Keg]	72.0 KEG	360,000	25,920,000	SBM
	- Transport (PP) [10 Keg]	10.0 KEG	2,125,000	21,250,000	
	- Penginapan [4 Orang x 1 Malam x 10 Keg]	40.0 KEG	360,750	14,430,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pulang Pisau, 31 Desember 2024

I Made Landep, SH.
NIP 197210041993031006

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402026 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 1 dari 3

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%
JUMLAH SELURUHNYA		193,591,000	0	183,076,315	9,455,400	192,531,715	99.45 %
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		193,591,000	0	183,076,315	9,455,400	192,531,715	99.45 %
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		193,591,000	0	183,076,315	9,455,400	192,531,715	99.45 %
AEA Koordinasi		1,500,000	0	1,440,000	0	1,440,000	96.00 %
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara		1,500,000	0	1,440,000	0	1,440,000	96.00 %
052 Dukungan Penyelesaian Perkara		1,500,000	0	1,440,000	0	1,440,000	96.00 %
052.0C Kimwasmat		1,500,000	0	1,440,000	0	1,440,000	96.00 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1,500,000	0	1,440,000	0	1,440,000	96.00 %
000001. Uang Harian		1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	100.00
000002. Tiket dan Transportasi		60,000	0	0	0	0	0.00 %
BCA Perkara Hukum Perseorangan		57,500,000	0	55,437,200	1,923,400	57,360,600	99.76 %
BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah		57,500,000	0	55,437,200	1,923,400	57,360,600	99.76 %
051 Pendaftaran Berkas Perkara		25,413,000	0	23,488,700	1,923,400	25,412,100	100.00
051.0A TANPA SUB KOMPONEN		25,413,000	0	23,488,700	1,923,400	25,412,100	100.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		25,413,000	0	23,488,700	1,923,400	25,412,100	100.00
000004. Alat Tulis Kantor		25,413,000	0	23,488,700	1,923,400	25,412,100	100.00
052 Penetapan Hari Sidang		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00
052.0A TANPA SUB KOMPONEN		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00
000005. Pengiriman Penetapan Hari Sidang		300,000	0	300,000	0	300,000	100.00
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.		1,143,000	0	1,142,500	0	1,142,500	99.96 %
053.0A TANPA SUB KOMPONEN		1,143,000	0	1,142,500	0	1,142,500	99.96 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		543,000	0	542,500	0	542,500	99.91 %
000006. Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan		543,000	0	542,500	0	542,500	99.91 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600,000	0	600,000	0	600,000	100.00
000007. Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan		600,000	0	600,000	0	600,000	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402026 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 2 dari 3

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
						%	
Penahanan		600,000	0	600,000	0		0
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan		15,824,000	0	15,814,000	0	15,814,000	99.94 %
054.0A TANPA SUB KOMPONEN		15,824,000	0	15,814,000	0	15,814,000	99.94 %
521211 Belanja Bahan		15,824,000	0	15,814,000	0	15,814,000	99.94 %
000008. Konsumsi makan terdakwa dan Penjaga Tahanan		15,824,000	0	15,814,000	0	15,814,000	99.94 %
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa		1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	100.00
055.0A TANPA SUB KOMPONEN		1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	100.00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		275,000	0	275,000	0	275,000	100.00
000009. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan		275,000	0	275,000	0	275,000	100.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00
000010. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00
056 Minutasi/Upaya hukum		2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	100.00
056.0A TANPA SUB KOMPONEN		2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	100.00
521211 Belanja Bahan		2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	100.00
000011. Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara		2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	100.00
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama		5,849,000	0	5,849,000	0	5,849,000	100.00
057.0A TANPA SUB KOMPONEN		5,849,000	0	5,849,000	0	5,849,000	100.00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		2,649,000	0	2,649,000	0	2,649,000	100.00
000012. Pengiriman salinan putusan		2,649,000	0	2,649,000	0	2,649,000	100.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00
000013. Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/terdakwa		2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	100.00
000014. Pemberitahuan Putusan Banding		600,000	0	600,000	0	600,000	100.00
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama		4,226,000	0	4,098,000	0	4,098,000	96.97 %
058.0A TANPA SUB KOMPONEN		4,226,000	0	4,098,000	0	4,098,000	96.97 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1,926,000	0	1,798,000	0	1,798,000	93.35 %
000015. Pengiriman berkas kasasi dan PK		1,926,000	0	1,798,000	0	1,798,000	93.35 %

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402026 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hal 3 dari 3

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
						%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	100.00
	000016. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00
	000017. Pemberitahuan Proses Kasasi/PPK kepada Jaksa/terdakwa/penasehat hukum	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00
	QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	000018. Honor Advokat Piket	28,000,000	0	25,663,000	2,333,000	27,996,000	99.99 %
	QCA Perkara Hukum Perseorangan	106,591,000	0	100,536,115	5,199,000	105,735,115	99.20 %
	QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,340,000	0	860,000	0	860,000	64.18 %
	051 Biaya Perkara	1,340,000	0	860,000	0	860,000	64.18 %
	051.0A PEMBEBASAN BIAYA PERKARA	1,340,000	0	860,000	0	860,000	64.18 %
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,340,000	0	860,000	0	860,000	64.18 %
	000028. Keperluan Sehari-hari Habis Pakai	1,340,000	0	860,000	0	860,000	64.18 %
	QCA.002 Sidang di luar Gedung Pengadilan	105,251,000	0	99,676,115	5,199,000	104,875,115	99.64 %
	051 Sidang Diluar Gedung Pengadilan	105,251,000	0	99,676,115	5,199,000	104,875,115	99.64 %
	051.0A TANPA SUB KOMPONEN	105,251,000	0	99,676,115	5,199,000	104,875,115	99.64 %
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	100.00
	000027. Spanduk, Brosur dan Belanja Habis Pakai Keperluan Sidang Keliling	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	100.00
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,951,000	0	19,031,400	919,000	19,950,400	100.00
	000026. ATK Sidang Keliling	19,951,000	0	19,031,400	919,000	19,950,400	100.00
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61,600,000	0	56,944,715	4,280,000	61,224,715	99.39 %
	000019. Uang Harian	25,920,000	0	22,680,000	2,880,000	25,560,000	98.61 %
	000020. Transport (PP)	21,250,000	0	20,650,000	600,000	21,250,000	100.00
	000021. Penginapan	14,430,000	0	13,614,715	800,000	14,414,715	99.89 %

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.